

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

**DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2019**



**DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jl. K.K. Singawinata No. 116 Telp. (0264) 201078, (0264) 200905 Purwakarta

TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sampurasun

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 dapat diselesaikan sesuai harapan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 merupakan dokumen pelaporan yang menggambarkan kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari visi dan misi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta selama 1 (satu) tahun anggaran. Dokumen ini diharapkan mampu menjawab salah satu prinsip penyelenggaraan negara yang mengedepankan asas akuntabilitas dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2019.

Kami menyadari dalam penyusunan LAKIP Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 ini masih jauh dari sempurna.

Oleh karenanya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah kami menghaturkan permohonan maaf atas kekurangan dan kelemahan yang



ada. Kami meyakini bahwa manusia hanya mempunyai itikad dan yang menentukan keberhasilan itikad adalah Allah SWT. Semoga itikad dan upaya ini mendapat ridho dari-Nya. *Amin Yaa Robbal 'Aalamiin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwakarta, Februari 2020
Kepala
Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Kabupaten Purwakarta,

AGUNG WAHYUDI, ST., MT., MM.
NIP. 19780811 200312 1 005



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 merupakan wujud Akuntabilitas Kinerja Dinas kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Dinas dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara sistematis. Selain media pertanggungjawaban Kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Akuntabilitas ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Dinas yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan Kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Pertanggungjawaban kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja Tahun 2019 dengan Penetapan Kinerja (TAPKIN) 2019 yang telah disusun pada awal tahun sebagai penjabaran Renstra periode 2018-2023 yang berpedoman kepada Visi dan Misi yang ada dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 17 (tujuh belas) indikator kinerja yang ditetapkan dalam TAPKIN Tahun 2019 berdasarkan 6 (enam) sasaran strategis.

Berdasarkan 6 (enam) Sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta, Pencapaian kinerja dari seluruh sasaran tersebut dapat disimpulkan terdapat 3 (tiga) sasaran capaiannya melampaui target, 1 (satu) sasaran yang capaiannya mencapai target dan 2 (dua) sasaran tidak mencapai target.

Pencapaian kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2019 pencapaian sasaran strategis pertama yaitu "Meningkatkan Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik" dengan capaian 93,33 % (Tidak Tercapai), selanjutnya sasaran strategis ke dua yaitu "Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana Lingkungan" dengan rata-rata capaian sebesar 193,58 % (Target Terlampaui), pada pencapaian sasaran strategis ke tiga "Tersedianya hunian yang layak bagi seluruh masyarakat" dengan pencapaian sebesar 100,66% (Target Terlampaui), selanjutnya sasaran strategis ke empat yaitu "Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih Masyarakat" dengan capaian rata-rata sebesar 133,87% (Target Terlampaui), untuk sasaran strategis ke lima yaitu "Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah" mendapat capaian rata-rata 60,75% (Target Tidak Tercapai) dan untuk sasaran strategis ke enam yaitu "Optimalisasi Tata Kelola Pertanahan" mendapatkan capaian sebesar 100% (Target Tercapai).

Dari perhitungan rata-rata atau kumulatif, capaian kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2019 mencapai



persentase 113,69%, dengan hasil tersebut diatas, kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2019 dapat dinilai “sangat berhasil”.

Secara keseluruhan Kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2018 telah memenuhi harapan. Meskipun demikian pada Tahun 2019 dan seterusnya akan terus ditingkatkan akselerasinya dengan melakukan *upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah*.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-4
1.3 Struktur Organisasi	I-6
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	I-7
1.5 Aspek Strategis Organisasi (Isu Strategis Organisasi)	I-11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
2.1 Visi dan Misi	II-1
2.2 Tujuan dan Sasaran	II-4
2.3 Kebijakan dan Program	II-6
2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2018	II-9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	III-1
3.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu	III-14
3.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka menengah dalam perencanaan strategis	III-21
3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan	



Solusi	III-27
3.5 Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya .	III-43
3.6 Realisasi Anggaran	III-52
BAB IV PENUTUP.....	IV-1



DAFTAR LAMPIRAN :

- 1 Perjanjian Kinerja
2. Struktur Organisasi
3. Rencana Strategik Tahun 2018-2023
4. Rencana Kinerja Tahunan 2019
5. Pengukuran Kinerja Kegiatan 2019
6. Pengukuran Pencapaian Sasaran 2019
7. Rencana Aksi Tahun 2019



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pegawai Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Eselonering dan Jenjang Pendidikan Tahun 2019	I-16
Tabel 1.2 Pegawai Dinas Tata Ruang dan Permukiman Berdasarkan Golongan Ruang dan Kepangkatan Tahun 2019	I-17
Tabel 1.3 Data Sarana dan Prasarana Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2019..	I-19
Tabel 3.1.1 Skala Penilaian.....	III-3
Tabel 3.1.2 Pengukuran Pencapaian Sasaran Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2019	III-6
Tabel 3.2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1	III-7
Tabel 3.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 2	III-8
Tabel 3.2.3 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3	III-9
Tabel 3.2.4 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 4	III-9
Tabel 3.2.5 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 5	III-10
Tabel 3.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 6	III-10
Tabel 3.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1	III-11
Tabel 3.3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2	III-12
Tabel 3.3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3	III-13
Tabel 3.3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 4	III-13
Tabel 3.3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 5	III-14
Tabel 3.3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 6	III-17
Tabel 3.4.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1	III-16
Tabel 3.4.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2	III-17
Tabel 3.4.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3	III-17
Tabel 3.4.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4	III-18
Tabel 3.4.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5	III-18
Tabel 3.4.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 6	III-19



	Halaman
Tabel 3.5.2.1 Lokasi Pembangunan/Perbaikan Jalan Lingkungan Tahun 2019	III-24
Tabel 3.5.2.2 Lokasi Pembangunan/Perbaikan Jalan Lingkungan menuju Sekolah Tahun 2019	III-27
Tabel 3.5.2.3 Lokasi Pembangunan Drainase Kecamatan Perkotaan	III-31
Tabel 3.5.2.4 Lokasi Pembangunan TPT Kabupaten Purwakarta	III-31
Tabel 3.5.2.5 Lokasi Pembangunan Drainase yang bersumber dari Banprov 2019	III-32
Tabel 3.5.2.6 Lokasi Pembangunan MCK Kabupaten Purwakarta	III-32
Tabel 3.5.3.1 Data Rumah Layak Huni	III-34
Tabel 3.5.4.1 Lokasi Penyediaan Sarana Air Bersih Kabupaten Purwakarta	III-35
Tabel 3.6.1 Akuntabilitas Keuangan Sasaran 1	III-38
Tabel 3.6.2 Akuntabilitas Keuangan Sasaran 2	III-40
Tabel 3.6.3 Akuntabilitas Keuangan Sasaran 3	III-41
Tabel 3.6.4 Akuntabilitas Keuangan Sasaran 4	III-42
Tabel 3.6.5 Akuntabilitas Keuangan Sasaran 5	III-43
Tabel 3.6.6 Akuntabilitas Keuangan Sasaran 6	III-44
Tabel 3.8.1 Alokasi Anggaran Persasaran Strategis Tahun Anggaran 2019	III-53



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah merupakan suatu upaya secara terus menerus untuk tujuan mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan segenap potensi sumberdaya yang dimiliki, yang meliputi sumber daya manusia, daya dukung alam, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Guna menuju kearah tersebut diperlukan adanya pemerintahan daerah yang mandiri, kreatif, inovatif dan lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Kerjasama yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat menjadi semakin dekat yang memungkinkan kinerja layanan masyarakat (*public services*) menjadi lebih baik sehingga akselerasi pembangunan dan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah dicapai.

Seiring dengan penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk pencapaian *good governance and clean government*, serta optimalisasi pencapaian kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dapat



berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and services* sedangkan praktek terbaiknya disebut *good governance* atau pemerintahan yang baik. Agar *good governance* dapat terwujud dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak, baik dari pihak pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. *Good governance* menuntut adanya koordinasi yang baik, integritas, profesional, etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* dalam penyelenggaraan kekuasaan Pemerintahan Negara merupakan tantangan tersendiri.

Salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Seiring dengan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara mulai dari Pejabat Eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang



dipercayakan kepadanya berdasarkan rencana strategis yang sudah dirumuskan sebelumnya. Oleh karena itu untuk dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah terlebih dahulu harus menyusun Rencana Strategis sebagai tolok ukur pencapaian kinerja organisasi. Rencana Strategis merupakan upaya penetapan proses aktivitas yang berorientasi ke depan dengan memperkirakan berbagai hal agar aktivitas institusi di masa depan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dengan berdasar pada pertimbangan-pertimbangan yang rasional, logis, dan dapat dilaksanakan serta didasarkan pula pada nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam institusi. Wujud dari nilai-nilai tersebut dapat mencerminkan semangat demokrasi, rasa keadilan, kepekaan, efektif, efisien dan transparan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Selain berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* dalam perspektif yang lebih luas, LAKIP juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah, serta partisipasi/peran serta masyarakat. Dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud penerapan sistem akuntabilitas kinerja organisasi/institusi.

Guna terwujudnya otonomi daerah yang sejalan dengan upaya penciptaan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan



prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta sebagai bagian dari Instansi Pemerintah penyelenggara pemerintahan di daerah berkewajiban untuk melaporkan penyelenggaraan pemerintahan setiap tahunnya. Dalam rangka hal tersebut, maka Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019, sebagai media pertanggungjawaban dan pengukuran kinerja pembangunan pada tahun anggaran 2019.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta tahun 2019 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor



- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019;
 11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;



12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 160 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Tata Ruang dan Permukiman.

1.3 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
3. Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Pengawasan Bangunan, terdiri atas:
 - a. Seksi Penataan Ruang;
 - b. Seksi Pertanahan; dan
 - c. Seksi Pendataan dan Pengawasan Bangunan.
4. Bidang Tata Bangunan, terdiri atas:
 - a. Seksi Perencanaan Teknis;
 - b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan; dan
 - c. Seksi Jasa Konstruksi.
5. Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri atas:
 - a. Seksi Perumahan;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Permukiman; dan
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman.
6. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum, terdiri atas:
 - a. Seksi Pertamanan dan Permakaman;
 - b. Seksi Penerangan Jalan Umum; dan
 - c. Seksi Reklame.



7. UPTD Pengelola Rusunawa; dan
8. Jabatan Fungsional.

1.4 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Bagian Ketujuh Paragraf 3 Pasal 24 ayat (1) Dinas Tata Ruang dan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum ciptakarya, penataan ruang, bidang pertanahan serta bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Kemudian pada ayat (2) Peraturan Bupati tersebut, disebutkan bahwa : (2) Dinas Tata Ruang dan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum cipta karya, penataan ruang, bidang pertanahan, serta bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum cipta karya, penataan ruang, bidang pertanahan, serta bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum cipta karya, penataan ruang, bidang pertanahan serta bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum cipta karya, penataan ruang, bidang pertanahan serta bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan



tugas dan fungsinya.

Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum cipta karya, penataan ruang, bidang pertanahan, serta bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana tersebut di atas, meliputi sub Urusan Pemerintahan :

- a. Penataan ruang, berupa penyelenggaraan penataan ruang Daerah;
- b. Bangunan gedung, berupa penyelenggaraan bangunan gedung di dalam Daerah, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- c. Penataan bangunan dan lingkungan, berupa penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di dalam Daerah;
- d. Permukiman, berupa penyelenggaraan infrastruktur permukiman di dalam Daerah;
- e. Izin lokasi, berupa pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin lokasi di dalam Daerah;
- f. Sengketa tanah garapan, berupa penyelesaian sengketa tanah garapan di dalam Daerah;
- g. Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan berupa penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- h. Subyek dan Obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* berupa penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam Daerah;
- i. Tanah ulayat, berupa penetapan tanah ulayat yang lokasinya di dalam Daerah;
- j. Tanah kosong, yang terdiri atas :
 - a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah; dan
 - b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong di dalam Daerah.



- k. Izin membuka tanah, berupa pemberian rekomendasi untuk penertiban izin membuka tanah;
- l. Penggunaan Tanah, berupa perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya di dalam Daerah;
- m. Perumahan yang terdiri atas :
 - a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Daerah;
 - b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
 - c. Pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan; dan
 - d. Penertiban sertifikat kepemilikan bangunan gedung.
- n. Kawasan yang terdiri atas :
 - a. Pemberian rekomendasi atas penertiban izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman; dan
 - b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
- o. Perumahan dan permukiman kumuh, berupa pencegahan perumahan dan permukiman kumuh di Daerah;
- p. Prasarana, sarana dan utilitas umum, berupa penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan; dan
- q. Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman berupa sertifikasi dan registrasi bagi orang dan badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.



1.5 Aspek Strategis Organisasi (Isu Strategis Organisasi)

Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta sesuai Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Bagian Ketujuh Paragraf 1 Pasal 22 ayat (1) disebutkan bahwa : (1) Dinas Tata Ruang dan Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum cipta karya, penataan ruang, pertanahan, serta bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Daerah. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa : (2) Dinas Tata Ruang dan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Purwakarta melalui Sekretaris Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta melaksanakan 3 (tiga) urusan pemerintahan wajib yaitu urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum cipta karya dan penataan ruang, bidang pertanahan serta bidang perumahan dan kawasan permukiman. Hal tersebut tentunya bisa menggambarkan dan menjadi pegangan bahwa Dinas Tata Ruang dan Permukiman merupakan Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan yang sangat vital dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta berdasarkan tugas dan fungsinya adalah :

1. Urusan Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang :

Isu-isu penting di bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

- Pertumbuhan infrastruktur wilayah tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk dan kegiatan usaha.



- Tidak berimbangnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur antar bagian wilayah.
- Pesatnya pertumbuhan pemanfaatan ruang untuk aktivitas budidaya non pertanian dan kehutanan.
- Tidak seimbangnya perkembangan antar bagian wilayah.

Untuk lebih jelasnya, maka isu-isu penting di bidang urusan pekerjaan umum cipta karya dan penataan ruang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Jalan Lingkungan

- Kurangnya Tingkat Aksesibilitas Prasarana Infrastruktur Wilayah.

Belum meratanya dukungan infrastruktur wilayah jaringan jalan hingga ke pelosok perdesaan dan daerah terpencil, faktor utamanya berasal dari keterbatasan kemampuan pembiayaan / penganggaran. Pembangunan jalan membutuhkan anggaran yang cukup besar. Intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi pendapatan asli daerah yang sedang dilaksanakan pada saat ini belum mampu mengangkat keterpurukan daerah dalam hal anggaran, sehingga salah satu dampaknya kepada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur wilayah.

b. Air Bersih

- Belum optimalnya pelayanan air minum kepada masyarakat. Penyediaan air bersih di Kabupaten Purwakarta sebagian besar dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta dengan sumber pengambilan air baku dari mata air Cigoong di Desa Salem Kecamatan Pondoksalam dengan debit 65 liter/ detik dan dari intake Waduk Jatiluhur (IPA Ubrug) sebesar 160 liter/ detik.



- Kapasitas air baku dan pelayanan air bersih perpipaan masih terbatas

Pada saat ini air bersih di Kabupaten Purwakarta khususnya di perkotaan baru terlayani sebanyak 48,76% satuan sambungan langsung untuk rumah dan industri. Sedangkan penyediaan air bersih untuk perdesaan menggunakan sumber mata air yang ada yang dikelola oleh warga masyarakat dengan bantuan pengadaan instalasi dan distribusinya dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Adapun berdasarkan data terakhir, penduduk yang tidak menggunakan sumber dari mata air maupun dari PDAM menggunakan sumber air dangkal sebanyak 81% dan sumur dalam 16%.

- Masih tingginya kebocoran air minum
Kebocoran disebabkan oleh kebocoran teknis (misalnya rusaknya water meter dan pipa bocor) dan non teknis (illegal connection dan administrasi). Kebocoran ini akan terus meningkat apabila kinerja pengelolaan PDAM tidak diperbaiki. Terdapat korelasi yang kuat antara menurunnya kinerja pengelolaan PDAM dengan meningkatnya kebocoran.
- Masih terdapat daerah rawan air bersih terutama pada musim kemarau

c. Drainase :

- Masih terdapat banyak daerah genangan terutama di kawasan perkotaan

Sampai saat ini diwilayah perkotaan masih terdapat beberapa titik genangan yang harus segera diperbaiki. Hal ini disebabkan oleh kondisi infrastruktur drainase perkotaan yang perlu perbaikan.



- Belum optimalnya penanganan drainase secara baik dan berwawasan lingkungan.

Belum optimalnya penanganan drainase karena rendahnya kesadaran seluruh stakeholder terhadap penanganan drainase dalam mendukung kualitas lingkungan hidup yang baik.

- Tidak berfungsinya saluran drainase.

Kelangkaan lokasi untuk pembuangan sampah menyebabkan masyarakat membuang sampah ke saluran drainase. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan persentase kawasan tergenang dan persentase terhambatnya fungsi drainase.

d. Tata Ruang :

- Dengan adanya perkembangan pembangunan dan pertumbuhan kawasan industri baru, maka Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah ada (Perda Nomor 11 Tahun 2012) perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan pembangunan dan pertumbuhan industri antara lain adanya jalur Kereta Api Cepat (KCIC) yang melintasi wilayah Kabupaten Purwakarta serta adanya pertumbuhan kawasan industri baru.
- Setelah adanya legalisasi (Perda) Revisi RTRW yang mengacu pada UU Nomor 26 Tahun 2007, Dinas Tata Ruang dan Permukiman harus segera menyusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) sebagai perangkat operasional RTRW Kabupaten, namun sampai saat ini belum ada satupun RDTR yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) sehingga belum RDTR yang sudah ada belum dapat dijadikan sebagai acuan / pedoman dalam mengatur pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Purwakarta.



- Disamping RDTRK diatas, harus disusun juga Peraturan Zonasi (*Zoning Regulation*) dalam bentuk Peraturan Daerah dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
- Untuk lebih rinci dan detail sebaiknya setelah adanya RDTRK dan Peraturan Zonasi disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) untuk kawasan/blok yang bernilai strategis.

2. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman :

Isu-isu penting di bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

- Tingginya *back log* penyediaan rumah tinggal.
- Terbatasnya kemampuan pembiayaan masyarakat untuk tempat tinggal yang layak.
- Meningkatnya lingkungan permukiman padat / kumuh.
- Terbatasnya sarana dan prasarana dasar permukiman.
- Kurang optimalnya pengelolaan dan penataan taman pemakaman umum (TPU) di Kabupaten purwakarta.
- Semakin berkurangnya Ruang Terbuka Hijau, khususnya di perkotaan akibat banyaknya alih fungsi lahan menjadi perumahan, industri dan perniagaan.
- Kurangnya pemerataan pemasangan jaringan PJU, khususnya di desa-desa dan belum optimalnya pemeliharaan jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU)
- Untuk lebih jelasnya, maka isu-isu penting di bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Sarana Prasarana Dasar Perumahan

- Terbatasnya kemampuan penyediaan prasarana dan sarana perumahan.



Penyediaan prasarana dan sarana dasar oleh pemerintah terhadap kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat yang dihuni oleh masyarakat berpendapatan rendah. Dengan demikian diharapkan masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah mempunyai kemampuan untuk memiliki rumah yang layak huni dalam kawasan yang sehat. Namun demikian, kemampuan pemerintah untuk mendukung penyediaan prasarana dan sarana tersebut masih terbatas. Faktor ini menjadi salah satu penghambat dalam penyediaan perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah serta pemicu menurunnya kualitas kawasan yang dihuni oleh masyarakat berpendapatan rendah.

- Masih rendahnya efisiensi dalam pembangunan perumahan. Tingginya biaya administrasi perijinan yang dikeluarkan dalam pembangunan perumahan merupakan satu persoalan yang senantiasa dihadapi dalam pembangunan perumahan. Tingginya biaya perijinan untuk pembangunan perumahan menimbulkan ketidakefisienan pasar perumahan karena biaya tersebut akan diteruskan (pass-through) kepada konsumen sehingga semakin menjauhkan keterjangkauan (affordability) masyarakat terhadap harga yang ditawarkan.

3. Urusan Pertanahan :

Isu-isu penting di bidang urusan Pertanahan di Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

- Kurangnya data/informasi tentang pertanahan (kebutuhan tanah dan ketersediaan tanah).
- Kurangnya pemahaman aparaturnya tentang hukum pertanahan
- Pencatatan data tanah aset Pemda kurang optimal



- Belum/kurang tersedianya tanah untuk kepentingan pembangunan

Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta perlu didukung oleh aparatur yang mempunyai kompetensi baik secara kualitas maupun kuantitas. Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta saat ini didukung dengan 251 pegawai yang tersebar pada unit kerja sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Jumlah Pegawai tersebut terdiri dari 74 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 17 Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan 160 Tenaga Harian Lepas (THL).

Berikut adalah sumber daya manusia pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta berdasarkan eselonering, pangkat/golongan ruang dan jenjang pendidikan :

Tabel 1.1
Pegawai Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Berdasarkan Eselonering dan Jenjang Pendidikan
Tahun 2019

No.	Eselonering	Jumlah	Pendidikan						
			SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3
1.	Eselon II.b	1	-	-	-	-	-	1	-
2.	Eselon III.a	1	-	-	-	-	-	1	-
3.	Eselon III.b	4	-	-	-	-	3	1	-
4.	Eselon IV.a	17	-	-	-	-	15	2	-
5.	Pelaksana	51	3	-	30	4	14	-	-
6.	Pegawai Tidak Tetap	17	-	-	15	-	2	-	-
7.	Tenaga Harian Lepas	160	17	35	87	4	17	-	-
	Jumlah	251	20	35	132	8	51	5	-



Tabel 1.2
Pegawai Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan
Tahun 2019

No.	Pangkat/Gol. Ruang	Jumlah
1	IV.a	2
2	III.d	9
3	III.c	10
4	III.b	4
5	III.a	16
6	II.d	3
7	II.c	21
8	II.b	4
9	II.a	1
10	I.c	2
11	PTT	17
12	THL	160
	Jumlah	253

Berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2 tersebut di atas, komposisi pegawai Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta sebanyak 251 orang yang terdiri dari Golongan IV sebanyak 2 (dua) orang, Golongan III sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang, Golongan II sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dan Golongan I sebanyak 2 (dua) Orang serta Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 160 (seratus enam puluh) orang.

Komposisi pegawai jika dilihat dari jenjang pendidikannya pegawai Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta telah menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana (S-2) sebanyak 5 (lima) orang, Sarjana (S-1) sebanyak 51 (lima puluh satu) orang, Diploma III (D-



III) sebanyak 8 (delapan) orang, SLTA sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) orang, SLTP sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dan sisanya sebanyak 20 (dua puluh) orang berpendidikan Sekolah Dasar (SD).

Selanjutnya dari sisi eselonering Dinas Tata Ruang dan Permukiman terdapat 23 (dua puluh tiga) jabatan struktural terdiri atas jenjang jabatan struktural eselon IIb sebanyak 1 (satu) orang, eselon IIIa sebanyak 1 (satu) orang, eselon IIIb sebanyak 4 (empat) orang dan eselon IVa sebanyak 17 (tujuh belas) orang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang mempunyai struktur organisasi dengan tugas dan fungsi yang sangat penting dan strategis, maka dengan kondisi sumber daya aparatur yang ada tersebut, maka secara kuantitas jumlah pegawai Dinas Tata Ruang dan Permukiman masih kurang memadai untuk ukuran Perangkat Daerah yang menangani 3 (tiga) urusan pemerintahan wajib serta memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Kekurangan jumlah pegawai tersebut terutama untuk tenaga perencana teknis dan pengawas lapangan, mengingat jumlah pegawai yang memiliki kompetensi sebagai tenaga perencana teknis dan pengawas yang ada sekarang masih sangat terbatas.

Sedangkan untuk kualitas pegawai yang ada pada saat ini dapat dikatakan sudah mencukupi, hal ini bisa digambarkan dengan jenjang pendidikan pegawai Dinas Tata Ruang dan Permukiman jumlahnya di atas 50 % (lima puluh persen) merupakan lulusan pendidikan Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana. Kemudian sebagian yang berpendidikan SLTA sedang mengikuti pendidikan S-1. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pegawai Dinas Tata Ruang dan Permukiman memiliki potensi yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.



Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta untuk mewujudkan visi dan misi perangkat daerah perlu didukung oleh sumber daya yang memadai, selain sumber daya aparatur yang profesional juga harus didukung sarana dan prasarana penunjang yang memadai.

Tabel 1.3
Data Sarana dan Prasarana
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2019

No	Nama/Jenis Barang	Merk	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Keadaan Barang			Ket.
					Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meja Kerja Staf	Aditech	2019	30 Unit	√			
2	Kursi Kerja Staff	Bovia	2019	30 Unit	√			
3	Kursi Rapat	Bovia	2019	10 Buah	√			
4	Lemari	Hand Made	2019	1 Set	√			
5	Sofa Besar	Sofa Kepoo	2019	1 Set	√			
6	Sofa Kecil	Sofa Kepoo	2019	1 Set	√			
7	Karpet	Inova	2019	45 m2	√			
8	notebook	Lenovo x280	2019	1 Unit	√			
9	Laptop	Aces Aspire 5	2019	2 Unit	√			
10	Desktop PC	Lenovo/F0 85	2019	2 Buah	√			
11	Printer	Epson L1455	2019	1 Unit	√			
12	Exsternal Hardisk	Seagate 2TB	2019	2 Set	√			
13	Laser Distance 150Pro	Leica	2019	1 Unit	√			
14	GPS Tracker	Garmin	2019	2 Unit	√			
15	Alat Ukur Kualitas Udara	Lutron	2019	1 Unit	√			
16	Alat Ukur Kecepatan Angina		2019	1 Unit	√			
17	GNSReceiver E300-Base&RoverSystem		2019	1 Unit	√			



	s							
18	GNS E-Survey E300 Receiver		2019	1 Unit	√			
19	Antenna UHF Radio		2019	1 Unit	√			
20	Software Survey Surpad (Permanen Licenced)		2019	1 Unit	√			
21	Android Smartphone Field Data Collector		2019	2 Unit	√			
22	Meteran		2019	2 Unit	√			
23	Tripod With Tribach Extention Pole		2019	2 Unit	√			
24	Hardease Bag		2019	2 Unit	√			
25	Waterpass/Automatic Level TCL AT32		2019	1 Unit	√			
26	Automatic Level TCL AT 32		2019	1 Unit	√			
27	Almunium Tripod		2019	1 Unit	√			
28	Rambu Ukuran-5 Meter		2019	1 Unit	√			
29	Compass Suunto KB20		2019	1 Unit	√			
30	Sepeda Motor Roda 2		2019	1 Unit	√			
31	Lemari Arsip Pintu Geser		2018	6 Unit	√			
32	Kursi Manager		2018	6 Unit	√			
33	Gordin Vertical Blind		2018	95 Unit	√			
34	Karpet		2018	62 Unit	√			
35	Sound System		2018	1 Unit	√			
36	Screen Proyektor		2018	1 Unit	√			
37	Vaccum Cleaner		2018	1 Unit	√			
38	PC All In One	Intel Core i3	2018	8 Unit	√			
39	Printer A3	On-demand Inject	2018	2 Unit	√			
40	Printer	On-demand Inject	2018	8 Unit	√			
41	Lemari Arsip Geser	Lufo	2017	6 Unit	√			
42	Filling Kabinet 4 Laci	Lufo	2017	6 Unit	√			

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2019**



43	Kursi Sofa Deluxe		2017	1 Set	√			
44	Kursi Sofa Standar		2017	6 Set	√			
45	Kursi Rapat		2017	40 Unit	√			
46	AC Split 2 PK		2017	5 Unit	√			
47	Sound System		2017	1 Set	√			
48	PC Unit		2017	3 Unit	√			
49	Note Book		2017	1 Unit	√			
50	Antena Wifi PC		2017	2 Unit	√			
51	Printer Infus	Epson	2017	8 Unit	√			
52	TV LED 32		2017	2 Unit	√			
53	Mobil Penumpang	Honda HRV	2017	1 Unit	√			
54	Mobil Penumpang	TOYOTA INOVA	2014	1 Unit	√			
55	Mobil Barang	MITSUBISI HI	2000	1 Unit				
56	Mobil Penumpang	TOYOTA INOVA	2010	1 Unit	√			
57	Mobil Penumpang	HONDA MOBILIO DO4 1.5 E MT CVT CKD	2015	1 Unit	√			
58	Mobil Penumpang	HONDA MOBILIO DO4 1.5 E MT CKD	2015	1 Unit	√			
59	Mobil Penumpang	Toyota/New Avansa Velos	2013	1 Unit		√		
50	Mobil Penumpang	Isuzu Panther	2003	2 Unit		√		
51	Mobil Penumpang	Toyota Kijang Standar	1996	1 Unit		√		
52	Mobil Barang	Suzuki GC 415T	2011	1 Unit		√		
53	Truck/Mobil Tangki Air	Truk Tangki Air Isuzu	1992	1 Unit		√		



54	Mobil Tangki Air	Truk Tangki Mitsubishi Mobil	2000	1 Unit		√		
55	Light Truck Dump/AWP	Tangga/Toyota Dyna	2004	1 Unit		√		
56	Tangki Air Isuzu	Isuzu	2011	1 Unit		√		



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Indikator Kinerja Program, Strategi Pembangunan, Kebijakan, Program dan Sasaran serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 (lima) tahun mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Rencana Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan.



Visi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta disusun dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Purwakarta serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta pada tahun 2018-2023 yang hendak dicapai yaitu " **MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA** " sesuai dengan Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta yang tertuang dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 - 2023.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu OPD yang mengemban Misi ke 1 "**Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial**" dan Misi ke 3 "**Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan**"

Memperhatikan Misi tersebut diatas, Dinas Tata Ruang dan Permukiman mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian serta mendorong pertumbuhan pembangunan Kabupaten Purwakarta.

Misi tersebut merupakan upaya-upaya yang harus dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman, sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang bertugas melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum cipta karya, penataan ruang, pertanahan, serta bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Tata Ruang dan Permukiman dituntut untuk memiliki kompetensi dan profesionalisme yang memadai agar mampu mengembangkan, mengelola, menata dan meningkatkan kualitas sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman dalam rangka menopang pembangunan guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia



(pendidikan, kesehatan, agama) dan pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat (pertanian, industri, perdagangan/jasa, pariwisata) Kabupaten Purwakarta dengan kurun waktu pencapaian sampai dengan tahun 2023.

Dalam rangka mewujudkan misi ke 1 dan misi ke 3 tersebut, didasarkan pada nilai-nilai agama dan budaya daerah, dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi landasan dalam operasional dinas, sebagai berikut :

1. *Good Governance* (tata kelola pemerintahan), yaitu pengelolaan dan pengurusan pemerintahan yang baik bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga keserasian interaksi yang konstruktif di antara domain negara, swasta dan masyarakat;
2. *Integrity* (integritas), yaitu suatu kesatuan perilaku yang melekat pada prinsip-prinsip moral dan etika, terutama mengenai karakter moral dan kejujuran, yang dihasilkan dari suatu sistem nilai yang konsisten;
3. *Quality and Accountability* (mutu dan akuntabilitas), yaitu suatu tingkatan kesempurnaan, merupakan karakteristik pribadi yang mampu memberikan hasil yang melebihi kebutuhan ataupun harapan, dan sebuah bentuk tanggungjawab untuk suatu tindakan, keputusan dan kebijakan yang telah mempertimbangkan mengenai aturan, pemerintahan dan implementasinya, dalam pandangan hukum dan tata kelola yang transparan;
4. Pemerataan pembangunan yang berkeadilan, yaitu upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar termasuk perumahan beserta



sarana dan prasarananya, serta memberikan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil, menengah, dan besar;

5. Penggunaan data dan informasi yang terintegrasi (satu data dan informasi) Kabupaten Purwakarta yang akurat, terbaharukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi tersebut terdiri dari data dan informasi spasial (keruangan) dan a spasial.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Tujuan dan sasaran Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2018-2023 berdasarkan misi yang telah di rumuskan adalah sebagai berikut :



Tujuan :

Tujuan merupakan penjabaran dan implementasi dari pernyataan Misi dan menjadi pedoman dalam penetapan strategi yang akan ditempuh dalam operasional organisasi. Tujuan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya aparatur dalam rangka peningkatan kinerja melalui penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mewujudkan Keunggulan Kawasan Permukiman dan Kawasan Strategis Daerah Yang Berbasis Nilai Kearifan Lokal dan Berorientasi Semangat Kompetisi Global.
3. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Masyarakat.
4. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah.
5. Meningkatkan Tata Kelola Pertanahan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Publik.

Sasaran :

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur.
2. Meningkatnya Kualitas dan Disiplin Kerja Aparatur.
3. Meningkatnya Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
4. Meningkatkan Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik.
5. Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana Lingkungan.
6. Tersedianya Hunian Yang Layak Bagi Seluruh Masyarakat
7. Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih Masyarakat.
8. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah.
9. Optimalisasi Tata Kelola Pertanahan.



2.3 Kebijakan dan Program

Kebijakan dan program merupakan strategi atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Kebijakan dan program Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 berdasarkan tujuan yang dirumuskan sebagai berikut :

Kebijakan :

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas harus didukung dengan arah kebijakan yang tepat guna mewujudkan Visi dan Misi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta yang merupakan bagian dari pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta, Kebijakan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan anggaran dan sarana serta prasarana aparatur dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran.
2. Meningkatkan Ketersediaan Anggaran dan Memberikan Kesempatan untuk Mengikuti Diklat Aparatur serta Pemberian Motivasi Kerja Pegawai.



3. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Data dan Informasi sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD.
4. Membangun/Merevitalisasi Taman dan Jalur Hijau, Fasilitas Publik dan Ornamen Kota.
5. Mempertahankan Kualitas Taman dan Jalur Hijau.
6. Mempertahankan Kualitas Ornamen Kota.
7. Meningkatkan Jumlah Lampu Hias Pada Ruang Publik dan Jalur Perlintasan Strategis.
8. Membangun dan Memperbaiki Jalan Lingkungan.
9. Membangun dan Memperbaiki Sistem Drainase Lingkungan.
10. Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Pelayanan Pengolahan Limbah.
11. Meningkatkan Luasan TPU Yang Dikelola Pemda.
12. Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Menyediakan dan Memelihara Sarana Prasarana Lingkungan.
13. Memfasilitasi Penyediaan dan Perbaikan Tempat Tinggal Bagi Kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
14. Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Air Bersih Komunal dan Perpipaan.
15. Meningkatkan Kualitas dan Proses Penetapan Produk RDTR/RTR KSK Melalui Pemanfaatan Teknologi dan Partisipasi Publik.
16. Merasionalisasi Proses Pengesahan Rencana Tapak dan Penertiban Rekomendasi IMB.
17. Mengintensifkan Pemantauan dan Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang.
18. Fasilitasi/ Penyediaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Daerah



Program :

Perencanaan Program merupakan suatu proses bagi penentuan jenis dan jumlah sumber daya yang diperlukan suatu perencanaan strategis. Program kerja merupakan penjabaran dari kebijakan sebagai arah dan strategi untuk pencapaian sasaran dan tujuan. Rencana Program Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Pembangunan dan Penataan Ruang Publik.
7. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
8. Program Pemeliharaan Ornamen Kota.
9. Program Pembangunan dan Pengelolaan Lampu Hias.
10. Program Pengembangan dan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU).
11. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan.
12. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong.
13. Program Lingkungan Sehat Perumahan.
14. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.
15. Program Pengelolaan Areal Pemakaman.
16. Program Pengembangan Perumahan.
17. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.
18. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum.
19. Program Perencanaan Tata Ruang.
20. Program Pemanfaatan Ruang.
21. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.



- 22. Program Keselamatan Gedung dan Bangunan.
- 23. Program Fasilitasi Administrasi Umum Pertanahan.

2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2019

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 dan Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2019 yang memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.



**LEMBAR PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DAN
FORMULIR PERNYATAAN KINERJA TAHUN 2018**



**LEMBAR PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
DAN
FORMULIR PERNYATAAN KINERJA TAHUN 2019**



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Tahun 2019 ini disusun dalam rangka menyajikan capaian kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman selama Tahun 2019 sebagai pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi.

Isi dari LAKIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya, penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman di masa mendatang.

Sistem pengukuran kinerja yang disajikan dalam LAKIP dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi melalui pengukuran indikator kinerja pada sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Tahun 2019.

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Tata Ruang dan Permukiman selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Purwakarta melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Inpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja



Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP merupakan laporan pencapaian keberhasilan instansi yang ditunjukkan oleh keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran Kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap sasaran dengan masing-masing indikator kinerjanya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategik Dinas Tata Ruang dan Permukiman dan sebab-sebab tercapai, terlampaui capaian dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran diberlakukan penggunaan skala penilaian untuk memberi makna atas nilai yang diperoleh sebagai berikut :

Tabel 3.1.1

SKALA PENILAIAN

SKALA NILAI	KATEGORI PENILAIAN
>100	Target terlampaui
100	Target Tercapai
< 100	Target tidak tercapai

Dalam pengukuran kinerja, perhitungan tingkat capaian sasaran (target), memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

Pencapaian Kinerja dalam persentase dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian}}{\text{Rencana}} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian sasaran strategis dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja untuk memberikan penjelasan tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Pada Tahun 2019 Dinas Tata Ruang dan Permukiman telah melaksanakan tahapan-tahapan pembangunan untuk mencapai Visi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Permukiman Tahun 2018-2023 yang berbunyi "**MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA**", serta Misi ke 1 "**Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial**" dan Misi ke 3 "**Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan**" sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta yang tertuang dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 - 2023

Guna pencapaian Visi tersebut, pada tahun 2019 Dinas Tata Ruang dan Permukiman membuat pernyataan penetapan kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Tahun 2019 yang terdiri dari 6 (enam) sasaran strategis beserta 17 (tujuh belas) indikator kinerjanya. Guna merealisasikan sasaran



strategis tersebut dilaksanakan melalui 22 program dan 168 kegiatan setelah adanya perubahan anggaran.

Pencapaian kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman pada Tahun 2019 mengacu kepada Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta. Visi dan Misi tersebut oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman dioperasionalkan dengan penetapan kinerja beserta penetapan sasaran strategis dan indikatornya sebanyak 6 (enam) sasaran strategis.

pernyataan penetapan kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Tahun 2019 telah ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis, dalam pencapaian **sasaran strategis pertama** yaitu **“Meningkatkan Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik”** dengan capaian **93,33 %**, selanjutnya **sasaran strategis ke dua** yaitu **“Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana Lingkungan”** dengan rata-rata capaian sebesar **193,58 %**, pada pencapaian **sasaran strategis ke tiga** **“Tersedianya hunian yang layak bagi seluruh masyarakat”** dengan pencapaian sebesar **100,66%**, selanjutnya **sasaran strategis ke empat** yaitu **“Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih Masyarakat”** dengan capaian rata-rata sebesar **133,87%**, untuk **sasaran strategis ke lima** yaitu **“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah”** mendapat capaian rata-rata **60,75%** dan untuk **sasaran strategis ke enam** yaitu **“Optimalisasi Tata Kelola Pertanahan”** mendapatkan capaian sebesar **100%**

Evaluasi Capaian Kinerja untuk setiap sasaran diuraikan sebagai berikut :



Tabel 3.1.2

**Pengukuran Pencapaian Sasaran Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Kabupaten Purwakarta Tahun 2019**

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target	Realisasi	(%) Tingkat Pencapaian
1	Meningkatkan Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik	Jumlah RTH, Fasilitas Publik, dan Ornamen Kota Yang Dibangun/Direvitalisasi	7	15	214,28
		Presentase RTH yang terpelihara (%)	100	80	80
		Persentase Ornamen Kota yang Terpelihara (%)	100	100	100
		Rasio Lampu Hias Yang terpasang	2,1	2,1	100
2	Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana Lingkungan	Panjang Jalan Lingkungan yang dibangun /diperbaiki (Km)	5	15,79	315,78
		Persentase Daerah Genangan Yang Tertangani (%)	2	4,92	246,19
		Jumlah Unit Pengelola Limbah Komunal yang dibangun	2	2	100
		Rasio Ketersediaan TPU milik pemda	7,6	1,79	23,58
		Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina (Jumlah Kelompok Masyarakat)	68	192	282,35
3	Tersedianya Hunian Yang Layak Bagi Seluruh Masyarakat	Rasio Rumah Layak Huni (%)	94,04	94,66	100,66
4	Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih Masyarakat	Persentase Desa Rawan Air Bersih (%)	5	3,83	123,40
		Persentase Mata Air yang Diamankan %	1	1,44	144,33



No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target	Realisasi	(%) Tingkat Pencapaian
5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah	Persentase RDTR / RTR Kawasan Strategis Yang Ditetapkan (%)	18,5	0	0
		Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang (%)	100	100	100
		Lama Proses Pengesahan Rencana Tapak/Penerbitan Rekomendasi IMB (Hari)	6	14	43
		Persentase Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang yang di pantau (%)	80	80	100
6	Optimalisasi Tata Kelola Pertanahan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tanah Untuk Pembangunan (%)	100	100	100

3.2. Analisis Capaian Kinerja Organisasi

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2019, sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta dan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 :

Meningkatkan Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik

Tabel 3.2.1
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian
1	2	3	4	5
1	Jumlah RTH, Fasilitas Publik, dan Ornamen Kota Yang Dibangun/Direvitalisasi (titik)	7 Titik	15 Titik	214,29 %



No	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian
2	Presentase RTH yang terpelihara (%)	100%	80 %	80 %
3	Persentase Ornamen Kota yang terpelihara (%)	100 %	100 %	100 %
4	Rasio Lampu Hias yang terpasang (%)	2,1	2,1	100 %
Rata-Rata				93,33%

Dari tabel 3.2.1 diatas terlihat bahwa capaian sasaran tersebut berdasarkan capaian indikator kinerja mencapai 93,33%. Persentase capaian dari sasaran tersebut melebihi target yang ditetapkan.

Sasaran 2 :

Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana Lingkungan

Tabel 3.2.2
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian
1	2	3	4	5
1	Panjang Jalan Lingkungan yang dibangun /diperbaiki (Km)	5	15,79	315,78 %
2	Persentase Daerah Genangan Yang Tertangani (%)	2	4,29	246,19 %
3	Rasio Ketersediaan TPU milik pemda (%)	7,6	2,36	23,58 %
4	Jumlah Unit Pengelola Limbah Komunal yang dibangun	2	2	100 %
5	Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina (Jumlah Kelompok Masyarakat)	68	192	282,35 %
Rata-Rata				193,58 %



Dari tabel 3.2.2 diatas terlihat bahwa rata-rata capaian sasaran tersebut berdasarkan capaian indikator kinerja mencapai 193,58 %. Persentase capaian dari sasaran tersebut melebihi target yang ditetapkan.

Sasaran 3 :

Tersedianya Hunian Yang Layak Bagi Seluruh Masyarakat

Tabel 3.2.3
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian
1	2	3	4	5
1	Rasio Rumah Layak Huni (%)	94,04	94,66	100,66 %
Rata-Rata				100,66 %

Dari tabel 3.2.3 diatas terlihat bahwa rata-rata capaian sasaran tersebut berdasarkan capaian indikator kinerja mencapai 100,66 %. Persentase capaian dari sasaran tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan.

Sasaran 4 :

Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih Masyarakat

Tabel 3.2.4
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 4

No	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase Desa Rawan Air Bersih (%)	5	3,83	123,4 %
2	Persentase Mata Air yang Diamankan (%)	1	1,44	144,33 %
Rata-Rata				133.87 %

Berdasarkan tabel 3.2.4 diatas, terlihat bahwa capaian sasaran 4 adalah sebesar 133.87 %. Persentase capaian dari sasaran tersebut melebihi target yang ditetapkan.



Sasaran 5 :
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah.

Tabel 3.2.5
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 5

No	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase RDTR / RTR Kawasan Strategis Yang Ditetapkan (%)	18,50	0	0 %
2	Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang (%)	100	100	100 %
3	Lama Proses Pengesahan Rencana Tapak/Penerbitan Rekomendasi IMB (Hari)	6	14	43 %
4	Persentase Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang yang dipantau (%)	80	80	100 %
Rata-rata				60,75 %

Berdasarkan tabel 3.2.5 diatas, terlihat bahwa capaian rata-rata sasaran 5 adalah sebesar 60,75%. Persentase capaian dari sasaran tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan.

Sasaran 6 :
Optimalisasi Tata Kelola Pertanahan.

Tabel 3.2.6
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 6

No	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tanah Untuk Pembangunan (%)	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan tabel 3.2.6 diatas, terlihat bahwa capaian sasaran 6 adalah sebesar 100 %. Persentase capaian dari sasaran tersebut mencapai target yang ditetapkan.



3.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Sasaran 1 :

Meningkatkan Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik

Tabel 3.3.1
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Capaian 2018	Capaian 2019
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah RTH, Fasilitas Publik, dan Ornamen Kota Yang Dibangun/Direvitalisasi (titik)	10 Titik	15 Titik	200 %	214,29 %
2	Presentase RTH yang terpelihara (%)	100 %	80 %	100 %	80 %
3	Persentase Ornamen Kota yang terpelihara (%)	-	100 %	-	100 %
4	Rasio Lampu Hias yang terpasang (%)	-	2,1	-	100 %
Rata-Rata				150%	93,33%

Dari tabel 3.3.1 diatas terlihat bahwa capaian sasaran berdasarkan capaian indikator tahun lalu sebesar 150 % yang dicapai dengan 2 (dua) indikator kinerja dan capaian indikator tahun ini sebesar 93,33 % yang dicapai dengan 4 (empat) indikator kinerja.



Sasaran 2 :

Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana Lingkungan

Tabel 3.3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Capaian 2018	Capaian 2019
1	2	3	4		5
1	Panjang Jalan Lingkungan yang dibangun /diperbaiki (Km)	7,8 Km	15,79 Km	425,58%	315,78%
2	Persentase Daerah Genangan Yang Tertangani (%)	96,92 %	4,29 %	96,92 %	246,19 %
3	Rasio Ketersediaan TPU milik pemda (%)	1,79 %	2,36 %	23,58%	31,10%
4	Jumlah Unit Pengelola Limbah Komunal yang dibangun	-	2	-	100 %
5	Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina (Jumlah Kelompok Masyarakat)	-	192	-	282,35 %
Rata-Rata				182,02%	193,58 %

Dari tabel 3.3.2 diatas terlihat bahwa capaian sasaran berdasarkan capaian indikator tahun lalu sebesar 182,02 % yang di capai oleh 3 (tiga) Indikator Kinerja dan capaian indikator tahun ini sebesar 193,58 % yang dicapai oleh 5 (lima) Indikator Kinerja.



Sasaran 3 :

Tersedianya Hunian Yang Layak Bagi Seluruh Masyarakat

Tabel 3.3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Capaian 2018	Capaian 2019
1	2	3	4	5	6
1	Rasio Rumah Layak Huni (%)	92,33%	94,66 %	98,18%	100,66 %

Dari tabel 3.3.3 terlihat bahwa capaian sasaran berdasarkan capaian indikator tahun lalu sebesar 98,18 % dan capaian indikator tahun ini sebesar 100,66 % .

Sasaran 4 :

Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih Masyarakat

Tabel 3.3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 4

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Capaian 2018	Capaian 2019
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Desa Rawan Air Bersih (%)	13,66%	3,83 %	61,21 %	123,4 %
2	Persentase Mata Air yang Diamankan (%)	-	1,44 %	-	144,33 %
Rata-Rata				61,21%	133,86%

Dari tabel 3.3.4 terlihat bahwa capaian sasaran berdasarkan capaian indikator tahun lalu sebesar 61,21 % yang dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja dan capaian indikator tahun ini sebesar 133,86 % yang dicapai oleh 2 (dua) indikator kinerja.



Sasaran 5 :
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah.

Tabel 3.3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 5

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Capaian 2018	Capaian 2019
1	2	3	4	5	6
1	Persentase RDTR / RTR Kawasan Strategis Yang Ditetapkan (%)	0 %	0 %	0 %	0 %
2	Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang (%)	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Lama Proses Pengesahan Rencana Tapak/Penerbitan Rekomendasi IMB (Hari	5 Hari	14 Hari	180 %	43 %
4	Persentase Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang yang dipantau (%)	-	80 %	-	100 %
5	Persentase RDTR / RTR Kawasan Strategis Yang Ditetapkan (%)	-	80	-	100 %
Rata-rata				93,33 %	68,6 %

Dari tabel 3.3.5 terlihat bahwa capaian sasaran berdasarkan capaian indikator tahun lalu sebesar 93,33 % yang dicapai oleh 3 (tiga) Indikator Kinerja dan capaian indikator tahun ini sebesar 68,6 % yang dicapai oleh 5 (lima) Indikator Kinerja.



Sasaran 6 :
Optimalisasi Tata Kelola Pertanahan.

Tabel 3.3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 6

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Capaian 2018	Capaian 2019
1	2		4		5
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tanah Untuk Pembangunan (%)	100 %	100%	100 %	100%

Dari tabel 3.3.6 terlihat bahwa capaian sasaran berdasarkan capaian indikator tahun lalu sebesar 100% dan capaian indikator tahun ini sebesar 100%



3.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka menengah dalam perencanaan strategis.

Sasaran 1 :

Meningkatkan Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik

Tabel 3.4.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Target Akhir Tahun RPJMD
1	2	4	6
1	Jumlah RTH, Fasilitas Publik, dan Ornamen Kota Yang Dibangun/Direvitalisasi (titik)	15	5
2	Presentase RTH yang terpelihara (%)	80	100
3	Persentase Ornamen Kota yang terpelihara (%)	100	100
4	Rasio Lampu Hias yang terpasang (%)	2,1	2

Dari tabel 3.4.1 diatas terlihat bahwa Realisasi sasaran 1 berdasarkan indikator kinerja ada yang melebihi dari target akhir tahun RPJMD dan ada yang sudah sesuai dengan target akhir tahun RPJMD dan ada juga yang masih di bawah target yang di tentukan.



Sasaran 2 :

Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana Lingkungan

Tabel 3.4.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Target Akhir Tahun RPJMD
1	2	4	6
1	Panjang Jalan Lingkungan yang dibangun /diperbaiki (Km)	15,79	11,39
2	Persentase Daerah Genangan Yang Tertangani (%)	4,29	10
3	Rasio Ketersediaan TPU milik pemda (%)	2,36	7
4	Jumlah Unit Pengelola Limbah Komunal yang dibangun	2	2
5	Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina (Jumlah Kelompok Masyarakat)	192	192

Dari tabel 3.4.2 diatas terlihat bahwa Realisasi sasaran 1 berdasarkan indikator kinerja ada yang melebihi dari target akhir tahun RPJMD dan ada yang sudah sesuai dengan target akhir tahun RPJMD dan ada juga yang masih di bawah target yang di tentukan.

Sasaran 3 :

Tersedianya Hunian Yang Layak Bagi Seluruh Masyarakat

Tabel 3.4.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Target Akhir Tahun RPJMD
1	2	4	6
1	Rasio Rumah Layak Huni (%)	94,66 %	90



Dari tabel 3.4.3 diatas terlihat bahwa Realisasi sasaran 3 berdasarkan indikator kinerja melebihi target akhir tahun RPJMD yaitu sebesar 90 %.

Sasaran 4 :

Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih Masyarakat

Tabel 3.4.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Target Akhir Tahun RPJMD
1	2	4	6
1	Persentase Desa Rawan Air Bersih (%)	3,83	16
2	Persentase Mata Air yang Diamankan (%)	1,44	40

Dari tabel 3.4.4 diatas terlihat bahwa Realisasi sasaran 4 berdasarkan indikator kinerja sudah melebihi dari target akhir tahun RPJMD.

Sasaran 5 :

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah.

Tabel 3.4.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Target Akhir Tahun RPJMD
1	2	4	6
1	Persentase RDTR / RTR Kawasan Strategis Yang Ditetapkan (%)	0	18,5
2	Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang (%)	100	100
3	Lama Proses Pengesahan Rencana Tapak/Penerbitan Rekomendasi IMB (Hari	14	5



No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Target Akhir Tahun RPJMD
4	Persentase Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang yang dipantau (%)	80	100
5	Persentase RDTR / RTR Kawasan Strategis Yang Ditetapkan (%)	100	100

Dari tabel 3.4.5 diatas terlihat bahwa ada yang masih belum sesuai dengan target akhir tahun RPJMD dan ada yang sudah sesuai dengan target akhir tahun RPJMD.

Sasaran 6 :
Optimalisasi Tata Kelola Pertanahan.

Tabel 3.4.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 6

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Target Akhir Tahun RPJMD
1	2	4	6
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tanah Untuk Pembangunan (%)	100 %	100 %

Dari tabel 3.4.7 diatas terlihat bahwa Realisasi sasaran 9 berdasarkan indikator kinerja sudah sesuai target akhir tahun RPJMD,

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

3.5.1 Sasaran 1

Berdasarkan data tersebut diatas, diketahui bahwa ada Indikator Kinerja yang ada yang melebihi target dan ada juga yang sudah sesuai dengan target yang diharapkan. Adapun hal-hal utama yang menjadi keberhasilan pada sasaran ini adalah Pembangunan/rehabilitasi/penataan/penyempurnaan bangunan gedung yang representatif, adanya Pembangunan dan Pemeliharaan RTH, Fasilitas



publik dan ornamen kota yang tertata dan berkarakter yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya, hanya saja pada pelaksanaan pemeliharaan RTH masih kurang maksimal dikarenakan adanya keterbatasan anggaran.

Pencapaian sasaran ini didukung dengan 5 (lima) program yaitu Program Pembangunan dan Penataan Ruang Publik, Program Pemeliharaan Ornamen Kota, Program Pembangunan dan Pengelolaan Lampu Hias Program Pembangunan dan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Program Pembangunan dan Penataan Ruang Publik didukung dengan 31 (tiga puluh satu) kegiatan sebagai berikut :

1. Lanjutan Penataan Kawasan Kantor Kecamatan Maniis
2. Pemagaran Dan Emplasement Kantor Kecamatan Kiarapedes
3. Pemagaran Dan Emplasement Kantor Kecamatan Bungursari
4. Penataan Kantor Kelurahan Purwamekar
5. Penataan Kantor Kelurahan Tegalmunjul
6. Rehab Kantor UDDC PMI Kabupaten Purwakarta
7. Perencanaan Teknis Penataan Bangunan Dan Lingkungan
8. Rehabilitasi Mesjid Ba`ing Yusuf
9. Karya Bakti TNI Resimen Armed 2 Sthira Yudha Penataan Tajug Gede Cilodong
10. Pembangunan Gedung Pusat Pelayanan Terpadu Pasar Jumaah
11. Pembangunan Kantor Kesbang
12. Pembangunan Kantor DPMD
13. Pemeliharaan Gapura Batas Kabupaten Purwakarta
14. Penyempurnaan Gapura Kota
15. Penataan Emplacement Gedung Kantor Dinas Tata Ruang dan Permukiman
16. Penyempurnaan Kawasan Kantor Kecamatan Babakan Cikao
17. Penataan Kawasan Kuliner Kecamatan Plered



18. Penataan PKL Cikopo
19. DED Pembangunan Baru Kantor Kecamatan Tegalwaru
20. DED Pembangunan Baru Kantor Kecamatan Pondoksalam
21. DED Pembangunan Baru Gedung Kantor Kelurahan Ciseureuh
22. Penyempurnaan Gedung Kantor UTD PMI Kabupaten Purwakarta
23. DED Pembangunan Kantor Diskominfo
24. DED Pembangunan Baru Kantor Pelayanan Untuk 3 Dinas (DPMD, DINSOS, BKBPIA)
25. DED Pembangunan Kantor Dinas Perhubungan
26. DED Pembangunan Kantor Depo Arsip
27. Lanjutan Pembangunan Gedung Pusat Pelayanan Terpadu Pasar Jumaah
28. Perencanaan Museum Nyi Pohaci
29. Pembangunan Mako Polres Purwakarta Tahap I
30. DED Pembangunan Kantor Disnakertrans
31. DED Buper Kwarcab Purwakarta

Selanjutnya Program Pemeliharaan Ornamen Kota yang didukung dengan 4 (empat) kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Panggung Reklame
2. Pemeliharaan dan Sewa Billboard Purwakarta Istimewa Tol Cipularang Km 86
3. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Teknis Penertiban dan Pembongkaran Reklame
4. Pembangunan Gudang Reklame

Selanjutnya Program Pembangunan dan Pengelolaan Lampu Hias yang didukung dengan 6 (enam) kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Lampu Hias Taman dan Lampu Hias Gedung
2. Pemeliharaan Lampu Hias Lampion
3. Pemeliharaan Lampu Hias Tirai



4. Pemeliharaan Lampu Gapura Batas Kota
5. Pemeliharaan Lampu Cabang Tiga
6. Pembuatan Lampu Hias Tirai Jalur Kuliner.

Selanjutnya Program Pembangunan dan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang didukung dengan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Jaringan Transmisi PJU
2. Pemasangan Jaringan Transmisi PJU

Selanjutnya Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang didukung dengan 34 (tiga puluh empat) kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan RTH
2. Pemeliharaan Persemaian Bibit Tanaman Hias
3. Pengadaan Mesin Rumput dan Chainsaw
4. Pemeliharaan Pompa Air
5. Pengecatan Gapura Batas Kabupaten
6. Pengecatan Gapura Kota
7. Pemeliharaan Taman Sadang
8. Pemeliharaan Taman Batas Kota
9. Pengadaan Tanaman Penghijauan
10. Pemeliharaan Taman Surawisesa
11. Pemeliharaan Taman Situ Buleud
12. Pemeliharaan Taman Cilodong
13. Pemeliharaan Patung
14. Pemeliharaan Repika Guci Keramik
15. Lanjutan Penataan Taman Tangga Cinta
16. Lanjutan Penataan Taman Baca
17. Pembuatan Garasi Kendaraan
18. Sewa Lahan Jalan Tengah
19. Rehabilitasi Taman Kemuning
20. Penataan Taman Jalan Jendral A. Yani



21. Biaya Operasional Penebangan Pohon
22. Pemeliharaan Taman Citra Resmi
23. Perencanaan Revitalisasi dan Penambahan Air Mancur Taman Sri Baduga
24. Peningkatan Kinerja Pengawasan dan Keselamatan Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum
25. Pemeliharaan Taman Tebing Ciganea
26. Pemagaran Taman
27. Perencanaan Penyiraman Otomatis Taman
28. Pemasangan Instrumen Tugu Pasar Rebo
29. Pembangunan Tugu Jam di Perempatan Pasar Rebo
30. Pengadaan Elektrikal Situ Buleud
31. Penataan Tugu Jam di Perempatan Pasar Rebo
32. Persediaan Bahan Cadangan Perbaikan Taman dan Penerangan Jalan Umum
33. Penataan Air Mancur Welas Asih
34. Capacity Building Pegawai Taman

3.5.2 Sasaran 2

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dan belum optimalnya perumusan indikator kinerja sasaran yang selaras dengan program dan kegiatan. Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang adalah, menambah sumber daya manusia yang kompeten dan melakukan pengkajian kembali terhadap Program dan Kegiatan agar selaras dengan indikator kinerja sasaran, serta belum adanya regulasi yang mendukung terkait pengelolaan areal pemakaman .



Pencapaian sasaran ini didukung dengan 5 (lima) program yaitu Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan, Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong, Program Lingkungan Sehat Perumahan, Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dan Program Pengelolaan Areal Pemakaman. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan didukung dengan 7 (tujuh) kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Menuju Sekolah
2. Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perkotaan
3. Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Lomba Desa
4. Pendataan Lokasi dan Kondisi Jalan Lingkungan Perkotaan di Kabupaten Purwakarta
5. Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan Kabupaten
6. Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Kabupaten
7. Rabat Beton Jalan Rawa Taal Desa Tegal Datar (Banprov Tahun 2019).

Untuk lokasi kegiatan program pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan dilaksanakan dengan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan perkotaan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5.2.1
Lokasi Pembangunan/Perbaikan Jalan Lingkungan Tahun 2019

NO	Lokasi	Volume (m ²)	Jenis Pekerjaan
1	Jalan Lingkungan RT. 03, 24 RW. 01 Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta	Panjang (M) = 444,00 Lebar (M) = 0,9-1,2	Paving
2	Jalan Lingkungan Rt.15 Rw. 04 Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta	Panjang (M) = 433,00 Lebar (M) = 1,3-2,20	Lapis Aspal Beton
3	Jalan Lingkungan Rt. 28 Rw. 02 Perum. Griya Mutiara I Desa Citalang Kecamatan Purwakarta	Panjang (M) = 194 Lebar (M) = 4	Paving



NO	Lokasi	Volume (m ²)	Jenis Pekerjaan
4	Jalan Lingkungan Rt. 05 Rw. 01 Kp. Sukamaju Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta	Panjang (M) = 358 Lebar (M) = 2,5 - 3	Lapis Aspal Beton
5	Jalan Lingkungan Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta	Panjang (M) = 285 Lebar (M) = 2 - 2,5	Lapis Aspal Beton
6	Jalan Lingkungan Rt. 11, 12 Rw. 03 Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta	Panjang (M) = 248 Lebar (M) = 2	Lapis Aspal Beton
7	Jalan Lingkungan Rt. 13 Rw. 11 Kp. Margajaya Kelurahan Munjul Jaya	Panjang (M) = 256 Lebar (M) = 2	Lapis Aspal Beton
8	Jalan Lingkungan Rt. 09 Rw. 02 Kelurahan Munjul Jaya Kecamatan Purwakarta	Panjang (M) = 300 Lebar (M) = 1,2 -2	Beton
9	Jalan Lingkungan Rt. 30, 32 Rw. 10 Jl. Samiaji III - Jl. Nakula IV Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta	Panjang (M) = 200,5 Lebar (M) = 2,7	Lapis Aspal Beton
10	Jalan Lingkungan Kampung Pangupukan RT. 06 RW. 02 Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta	Panjang (M) = 448 Lebar (M) = 2 - 2,40	Lapis Aspal Beton
11	Jalan Lingkungan Rt. 40 Rw. 04 Gang Melur Kelurahan Nagrikaler Kecamatan Purwakarta	Panjang (M) = 250 Lebar (M) = 2,5	Lapis Aspal Beton
12	Jalan Lingkungan Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta	Panjang (M) = 146 Lebar (M) = 2 - 3	Lapis Aspal Beton
13	Jalan Lingkungan Rt. 60 Rw. 06 Gang Wortel Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta	Panjang (M) = 215 Lebar (M) = 2,5	Beton
14	Jalan Lingkungan RT. 001 RW. 004 Tegaljunti Kecamatan Purwakarta	Panjang (M) = 170 Lebar (M) = 2,2	Beton
15	Jalan Lingkungan RT. 04 RW. 07 Kelurahan Tegalmunjul Kecamatan Purwakarta	Panjang (M) = 216 Lebar (M) = 2,4	Beton



NO	Lokasi	Volume (m ²)	Jenis Pekerjaan
16	Jalan Lingkungan RT. 09 RW. 03 Kelurahan Tegalmunjul Kecamatan Purwakarta	Panjang (M) = 414 Lebar (M) = 1,0 - 1,2	Beton
17	Jalan Lingkungan Jalan Rawa Sepat RT. 35 RW. 03 Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta	Panjang (M) = 337 Lebar (M) = 2,3 - 3	Lapis Aspal Beton
18	Jalan Lingkungan Rt. 05, 06, 07 Rw. 02 Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta	Panjang (M) = 467,50 Lebar (M) = 1,2-2	Lapis Aspal Beton
19	Jalan Lingkungan Rw. 03 Gang Masjid Al-Falah Sadang Kampung Cihideung Kelurahan Cisureuh Kecamatan Purwakarta	Panjang (M) = 414 Lebar (M) = 2,5	Lapis Aspal Beton
20	Jalan Lingkungan Rw. 05 Gang Mekarsari 1 Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta	Panjang (M) = 341,7 Lebar (M) = 2,5	Lapis Aspal Beton
21	Jalan Lingkungan Rw. 10 Malang Nengah Wetan Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta	Panjang (M) = 225 Lebar (M) = 2,2	Lapis Aspal Beton
22	Jalan Lingkungan Rw. 05 Kp. Bojong Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta	Panjang (M) = 330,5 Lebar (M) = 2-2,8	Lapis Aspal Beton
23	Jalan Tembusan Gang Sawo Rw. 06 Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta	Panjang (M) = 300 Lebar (M) = 3	Lapis Aspal Beton
24	Jalan Lingkungan Rt. 37 Rw. 13 Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta	Panjang (M) = 295,50 Lebar (M) = 1,5-2	Lapis Aspal Beton
25	Jalan Lingkungan RT. 05 RW. 02 Sukasari Kelurahan Tegalmunjul	Panjang (M) = 160 Lebar (M) = 2	Lapis Aspal Beton
26	Jalan Lingkungan Rt.03 rw.01 kel. Tegalmunjul kec. Pwk	Panjang (M) = 160 Lebar (M) = 1,5 - 3,00	Lapis Aspal Beton
27	Jalan Lingkungan Perumahan Hegarmanah Kel. Cisureuh (BKPSDM) Kec Purwakarta	Panjang (M) = 157 Lebar (M) = 4,00 - 4,80	Lapis Aspal Beton
28	Jalan Lingkungan Gg. Flamboyan 3 Kel. Nagrikaler kec. Purwakarta	Panjang (M) = 589 Lebar (M) = 4,00 - 4,80	Lapis Aspal Beton



NO	Lokasi	Volume (m ²)	Jenis Pekerjaan
29	Jalan Lingkungan Gg. Manggis Rt. 86 rw. 11 Kel. Nagrikaler	Panjang (M) = 225 Lebar (M) = 2,70 - 3,20	Lapis Aspal Beton
30	Jalan Lingkungan Rt. 33 Rw. 04 Kp. Margaluyu Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta	Panjang (M) = 375 Lebar (M) = 3,00 - 3,20	Lapis Aspal Beton
31	Jalan Lingkungan Perum Indaci Rt.8 Rw.02 kel. Munjul jaya Kec. Purwakarta	Panjang (M) = 600 Lebar (M) = 2,50 - 3,50	Lapis Aspal Beton
32	Jalan Lingkungan Gang Sukun Kelurahan Ciseureuh Kec. Purwakarta	Panjang (M) = 225 Lebar (M) = 2,50 - 3,00	Lapis Aspal Beton
33	Jalan Lingkungan Rw. 07 Kp. Ciseureuh Kelurahan Ciseureuh Kec. Purwakarta	Panjang (M) = 213 Lebar (M) = 2,70 - 2,85	Lapis Aspal Beton
34	Jalan Lingkungan Lodaya Rt.01 Rw.01 Kel. Nagritengah Kec. Purwakarta	Panjang (M) = 130 Lebar (M) = 2,20 - 2,20	Lapis Aspal Beton
35	Jalan Lingkungan Gang Anggrek I Rt. 30 Rw.03 Kel. Nagrikaler Kec. Purwakarta	Panjang (M) = 292 Lebar (M) = 3,00 - 3,50	Lapis Aspal Beton
36	Jalan Lingkungan Gang Alamanda Kel. Nagrikaler Kec. Purwakarta	Panjang (M) = 656 Lebar (M) = 1,60 - 2,80	Lapis Aspal Beton
37	Jalan Lingkungan Gang Langensari kel. Nagrikidul Kec. Purwakarta	Panjang (M) = 284,5 Lebar (M) = 2,70 - 4,00	Lapis Aspal Beton

Sedangkan untuk Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan dengan Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan menuju Sekolah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5.2.2
Lokasi Pembangunan/Perbaikan Jalan Lingkungan Menuju Sekolah Tahun 2019

NO	Lokasi	Volume (m ²)	Jenis Pekerjaan
1	Jalan Lingkungan Menuju SMPN 2 Kiarapedes Kp. Cikubang Desa	Panjang (M) = 179	Beton



NO	Lokasi	Volume (m ²)	Jenis Pekerjaan
	Pusakamulya Kecamatan Kiarapedes	Lebar (M) = 3	
2	Jalan Lingkungan Menuju SDN 1 Gununghejo Desa Gununghejo Kecamatan Darangdan	Panjang (M) = 81,50 Lebar (M) = 2,6 - 2,8	Beton
3	Jalan Lingkungan Menuju Sekolah PAUD dan MDA Darul Hikam RT. 002 RW. 001 Ds. Wanasari Kecamatan Wanayasa	Panjang (M) = 350 Lebar (M) = 2,4 - 2,8	Lapis Aspal Beton
4	Jalan Lingkungan Menuju Sekolah MTS Al-Fatah Jl. BBI Cirata Kp. Cilangkap RT. 10 RW. 05 Desa Cadasmekar Kecamatan Tegalwaru	Panjang (M) = 93,5 Lebar (M) = 3,5	Lapis Aspal Beton
5	Jalan Lingkungan Menuju PAUD RT. 11, 12, 13 RW. 04 Desa Kertasari Kecamatan Tegalwaru	Panjang (M) = 465 Lebar (M) = 0,8 - 1	Beton
6	Jalan Lingkungan Menuju MTs. Nurul Fatta Desa Sukahaji Kecamatan Tegalwaru	Panjang (M) = 77,5 Lebar (M) = 1,5 - 2,7	Beton
7	Jalan Lingkungan Menuju Sekolah SMPN 1 Campaka Desa Campaka Kecamatan Campaka	Panjang (M) = 125 Lebar (M) = 3,5	Lapis Aspal Beton
8	Jalan Lingkungan Menuju Sekolah SMPN 1 Bungursari Desa Bungursari Kec. Bungursariv	Panjang (M) = 212,5 Lebar (M) = 2,5 - 3	Lapis Aspal Beton
9	Jalan Lingkungan Menuju Sekolah SMPN 1 Babakancikao Desa Ciwareng Kec. Babakancikao	Panjang (M) = 72 Lebar (M) = 3,5	Lapis Aspal Beton
10	Jalan Lingkungan Menuju Sekolah SDN 3 Cijunti Desa Cijunti Kecamatan Campaka	Panjang (M) = 71 Lebar (M) = 2,5 - 3	Lapis Aspal Beton



NO	Lokasi	Volume (m ²)	Jenis Pekerjaan
11	Jalan Lingkungan Menuju Sekolah MTS Al-Manar Rt. 15 Rw. 03 Kel. Sindangkasih Kec. Purwakarta	Panjang (M) = 93,5 Lebar (M) = 1,8 - 3	Lapis Aspal Beton
12	Jalan Lingkungan Menuju Sekolah SDN 3 Sukatani Kp. Bendul Desa Sukatani Kecamatan Sukatani	Panjang (M) = 200 Lebar (M) = 2,2	Beton
13	Jalan Lingkungan Menuju Sekolah SDN 3 Sukamukti Kp. Sodong Desa Sukamukti Kec. Maniis	Panjang (M) = 212,8 Lebar (M) = 2,5	Beton
14	Jalan Lingkungan Menuju Madrasah Pondok Pesantren Awi Mekar Hade Akar Yayasan Bahrul Ulum Jl. Raya Bungursari Kp. Awimekar RT. 09/05 Ds. Bungursari Kecamatan Bungursari	Panjang (M) = 100 Lebar (M) = 3	Beton
15	Jalan Lingkungan Menuju SDN 2 Selaawi Kp. Gandasari Rt. 09 RW. 05 Desa Selaawi Kecamatan Pasawahan	Panjang (M) = 149,5 Lebar (M) = 2,5	Lapis Aspal Beton
16	Jalan Lingkungan Menuju SMAN 1 Pasawahan Desa Pasawahan Kidul Kecamatan Pasawahan	Panjang (M) = 300 Lebar (M) = 3	Lapis Aspal Beton
17	Jalan Lingkungan Menuju Sekolah SDN 3 Mulyamekar Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao	Panjang (M) = 165 Lebar (M) = 3,5	Lapis Aspal Beton
18	Kegiatan Jalan Lingkungan Menuju Sekolah SD Plis 2 - SMP Fullday Yayasan Al Muhajirin Kp. Sukamulya Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta	Panjang (M) = 90 Lebar (M) = 6	Lapis Aspal Beton
19	Jalan Lingkungan Menuju Pompes Az-Zarkasyih Kp. Simpang Rt. 45. Rw. 03 Kelurahan Nagrikidul	Panjang (M) = 90 Lebar (M) = 2,00 - 2,30	Lapis Aspal Beton



NO	Lokasi	Volume (m ²)	Jenis Pekerjaan
20	Jalan Lingkungan Menuju SMPN 2 Campaka Kecamatan Campaka	Panjang (M) = 639 Lebar (M) = 3,00 - 3,30	Lapis Aspal Beton
21	Jalan Lingkungan Menuju YPI Fatimatusa'adah Kp. Cihideung Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao	Panjang (M) = 289 Lebar (M) = 2,20 - 4,50	Lapis Aspal Beton
22	Jalan Lingkungan Menuju Pondok Pesantren/ Yayasan Assiqoyaturrohman Kp. Ciwareng Kulon Rt. 016 Rw. 006 Desa Cibogogirang Kecamatan Plered	Panjang (M) = 197 Lebar (M) = 2,00 - 2,20	Lapis Aspal Beton
23	Jalan Lingkungan Menuju SMPN 2 Kiarapedes	Panjang (M) = 109 Lebar (M) = 2,00 - 2,50	Lapis Aspal Beton

Pada tahun 2019 Dinas Tata Ruang dan Permukiman mendapatkan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat untuk Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Rawa Taal Desa Tegal Datar (Banprov Tahun 2019) dengan lokasi pelaksanaan di kampung rawa taal desa tegal datar dan pembangunan jalan sepanjang 215 m lebar 2,5 m dengan konstruksi beton

Selanjutnya Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang didukung dengan 5 (lima) kegiatan yaitu :

1. Pembangunan Drainase Perkotaan Kabupaten Purwakarta.
2. Pembangunan TPT Kabupaten Purwakarta.
3. Perencanaan dan Pengawasan Drainase.
4. Pembangunan Drainase Desa/Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta (Banprov Tahun 2019)
5. Pembangunan Drainase Jalan Ciakar - Warung Jeruk Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta (Banprov 2019).



Untuk lokasi kegiatan Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong dilaksanakan dengan kegiatan Pembangunan Drainase Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5.2.3
Lokasi Pembangunan Drainase Kecamatan Perkotaan

No	Lokasi	Jenis Perkerjaan
1	2	6
1	Kawasan Situ Bulued Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta	Perbaikan Saluran= 636 m
2	Jalan Kemuning Kelurahan Nagrikaler Kecamatan Purwakarta	Perbaikan Saluran= 165 m
3	Pasar Simpang Cigedogan Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta	Perbaikan Saluran= 72 m

Untuk lokasi kegiatan Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong dilaksanakan dengan kegiatan Pembangunan TPT Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5.2.4
Lokasi Pembangunan TPT Kabupaten Purwakarta

No	Lokasi	Jenis Perkerjaan
1	2	6
1	Desa Pasanggrahan Kecamatan Tegalwaru	Pembangunan TPT dengan Volume = 102,18 m
2	Gang Banteng Kelurahan Nagrikidul	Pembangunan TPT dengan Volume = 162 m

Pada tahun 2019 Dinas Tata Ruang dan Permukiman mendapatkan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat untuk Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase yang di bagi kedalam 2 (dua) Kegiatan yaitu Pembangunan Drainase Desa/Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta (Banprov Tahun 2019) dan Pembangunan Drainase Jalan Ciakar – Warung Jeruk Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta (Banprov 2019). Dengan lokasi dan hasil sebagai berikut :



Tabel 3.5.2.5
Lokasi Pembangunan Drainase yang bersumber dari Banprov 2019

No	Lokasi	Jenis Perkerjaan
1	2	6
1	Desa Pasanggrahan Kecamatan Tegalwaru	Pembangunan Saluran Drainase dengan Volume = 240 m
2	Jalan Ciakar-Warung jeruk Kecamatan Tegalwaru	Pembangunan Saluran Drainase dengan Volume = 111,5 m

Selanjutnya Program Program Lingkungan Sehat Perumahan yang didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu Pembangunan MCK Kabupaten Purwakarta dan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan MCK.

Untuk lokasi kegiatan Program Program Lingkungan Sehat Perumahan dilaksanakan dengan kegiatan Pembangunan MCK Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5.2.6
Lokasi Pembangunan MCK Kabupaten Purwakarta

No	Lokasi	Jenis Perkerjaan
1	2	6
1	Yayasan Madinah Darul Barokah Desa Dangdeur Kecamatan Bungursari	Pembangunan Tempat MCK dengan Luas Bangunan = 35 m
2	Desa Sumurugul Kecamatan Wanayasa	Pembangunan Tempat MCK dengan Luas Bangunan = 15 m
3	Kp Cilopang RT. 06 RW. 02 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes	Rehabilitasi Tempat MCK dengan Luas Bangunan = 22,5 m
4	Kp Empangsari Desa Kertasari Kecamatan Bojong	Rehabilitasi Tempat MCK dengan Luas Bangunan = 22,5 m

Selanjutnya Program Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan yang didukung dengan kegiatan Monitoring Program Kotaku

Selanjutnya Program pengelolaan areal pemakaman yang didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan Rehabilitasi Tempat Pemakaman Umum dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Sirnaraga (TMP).



Untuk Lokasi Kegiatan Program pengelolaan areal pemakaman dilaksanakan dengan Kegiatan Rehabilitasi Tempat Pemakaman Umum adalah sebagai berikut :

1. TPU Kamboja di Jalan Kamboja Kelurahan Nagri Tengah dengan pekerjaan perbaikan pondasi / turap dan plumbak serta permaikan pilar dan pagar besi beserta pengecatannya.
2. TPU Cisereuh di jalan Veteran Kelurahan Cisereuh dengan pekerjaan perbaikan turap dan pembuatan pedestrian serta pengecatan.

3.5.3 Sasaran 3

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa capaian sasaran sudah melebihi dengan apa yang telah ditetapkan sebagai target capaian. Walaupun begitu masih terdapat sedikit kendala yaitu terkait dengan persepsi masyarakat yang kurang memahami rumah sehat yang layak huni. Dalam rangka meminimalisir kendala tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang maka dilakukan sosialisasi tentang rumah sehat yang layak huni dan mendorong keswadayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas rumah tidak layak huni karena pada dasarnya program pembangunan Rumah Layak Huni hanya bersifat stimulan bagi masyarakat penerima Program Pembangunan Rumah Layak Huni, selain itu Pembangunan rumah oleh Pengembang Perumahan, khususnya pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan Dukungan kepada Pengembang, khususnya Pengembang Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), contohnya melalui sosialisasi mengenai peraturan perundangan di bidang perumahan serta dukungan dalam hal kemudahan penyelenggaraan penyediaan perumahan lainnya (Fasilitasi Rusunawa, Rumah Umum, Khusus dan Komersial).

Rasio Rumah Layak Huni pada tahun 2019 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:



Tabel 3.5.3.1
Data Rumah Layak Huni

No	Data Dasar	Jumlah Unit Rumah	Sumber Data
1	2	3	4
1.	Data Jumlah Rumah Tahun 2019	272,287	Data Dinas Kesehatan
2.	Data Rumah Tidak Layak Huni 2019	14,541	Data Bidang Perumahan Permukiman
3.	Jumlah Rumah Layak Huni 2019	257,746	Perhitungan = 1-2
4.	Rasio Rumah Layak Huni	94,66 %	Perhitungan Perbandingan rumah layak huni dengan jumlah total rumah di Kab. Purwakarta

Pencapaian sasaran tersebut didukung oleh Program Pengembangan Perumahan didukung dengan 6 (enam) kegiatan sebagai berikut :

1. Identifikasi Penyerahan PSU Perumahan Pengembang di Kabupaten Purwakarta.
2. Perencanaan Teknis Sarana & Prasarana Perumahan dan Permukiman
3. Monitoring Penyelenggaraan Perumahan
4. Dana Pendamping Rutilahu
5. Penyusunan Database Perumahan & Permukiman di Kabupaten Purwakarta
6. Penyusunan RP3KP Kabupaten Purwakarta.

3.5.4 Sasaran 4

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa capaian sasaran sudah melebihi dengan apa yang telah di ditetapkan sebagai target capaian.

Pencapaian sasaran tersebut didukung oleh Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku dan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku didukung dengan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

1. Identifikasi Kawasan Rawan Air Bersih Kabupaten Purwakarta
2. Penyediaan Sarana Air Bersih Kabupaten Purwakarta



3. Monitoring Kegiatan PAMSIMAS

Untuk lokasi kegiatan Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku dilaksanakan dengan kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5.4.1
Lokasi Penyediaan Sarana Air Bersih Kabupaten Purwakarta

No	Lokasi	Jenis Perkerjaan
1	2	3
1	Desa babakan kec. Wanayasa	Penyediaan jaringan pipa saluran Air Bersih sepanjang 200 m
2	Desa cisaat	Penyediaan jaringan pipa saluran Air Bersih sepanjang 950 m
3	Desa sindanglaya kec. Sukatani	Penyediaan jaringan pipa saluran Air Bersih sepanjang 404 m

Selanjutnya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum yang didukung dengan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Jembatan Pipa Air Minum Sasak Beusi
2. Penyusunan Naskah Akademis Tentang Raperda RISPAM

3.5.5 Sasaran 5

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada Indikator Kinerja yang mengalami kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab adalah Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang yang meliputi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan maupun Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (RTR/KSK) belum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah karena Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta sedang dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen penetapan menjadi Peraturan Daerah, salah satunya adalah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang adalah melakukan peninjauan kembali terhadap dokumen - dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang sudah ada selain itu penyebab Indikator Kinerja tidak



memenuhi target adalah kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dan untuk meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja sasaran pada tahun yang akan datang adalah dengan menambah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Pencapaian sasaran tersebut didukung oleh Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Program Pemanfaatan Ruang, Program Keselamatan Gedung dan Bangunan dan Program Perencanaan Tata Ruang. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang didukung oleh kegiatan Peningkatan Kinerja Pengesahan Site Plan.

Selanjutnya Program Pemanfaatan Ruang yang didukung dengan 6 (enam) kegiatan sebagai berikut

1. Pendataan Pemanfaatan Ruang
2. Finalisasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang Review Kajian Kawasan Perkotaan Purwakarta
3. Finalisasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang Review Kajian Kawasan Perkotaan Plered
4. Finalisasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang Review Kajian Kawasan Perkotaan Bungursari
5. Finalisasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang Review Kajian Kawasan Perkotaan Wanayasa
6. Finalisasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang Review Kajian Kawasan Perkotaan Campaka.

Selanjutnya Program Keselamatan Gedung dan Bangunan yang didukung dengan 14 (empat belas) kegiatan sebagai berikut :

1. Monitoring dan Pemeriksaan IMB
2. Sosialisasi Izin Mendirikan Bangunan
3. Pendataan Bangunan
4. Monitoring dan Pemeriksaan SLF
5. Penyempurnaan Aplikasi Sistem SOP Pelayanan IMB



6. Pengadaan Alat Penunjang Pengawasan Kegiatan Fisik Keciptakaryaan
7. Inventarisasi dan Pendataan Bangunan Industri di Kabupaten Purwakarta
8. Inventarisasi dan Pendataan Perumahan di Kabupaten Purwakarta
9. Biaya Penunjang Tim Ahli Bangunan Gedung
10. Biaya Penunjang Tim Ahli Pengkaji Teknis
11. Kajian Teknis dan Naskah Akademis Peraturan Daerah Penentuan Nilai Retribusi IMB
12. Kajian Teknis dan Naskah Akademis Pengaturan Intensitas Bangunan di Kabupaten Purwakarta
13. Sertifikat laik Fungsi Bangunan Kantor Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
14. Monitoring Tim Teknis Pemeriksa Bangunan.

Selanjutnya Program Perencanaan Tata Ruang yang didukung dengan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut :

1. Review Kajian Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Babakancikao
2. Review Kajian Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Pasawahan
3. Kajian Teknis dan Naskah Akademis Arahan dan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Perumahan

3.5.6 Sasaran 6

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa capaian sasaran sudah sesuai dengan apa yang telah di tetapkan sebagai target capaian. Pencapaian sasaran ini didukung dengan Program Fasilitasi Administrasi Umum Pertanahan dengan didukung dengan 4 (empat) kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Tanah Kantor Camat Tegalwaru
2. Pengadaan Bangunan Gedung Kantor



3. Pengadaan Tanah di Desa Cianting
4. Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Purwakarta

3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Ditinjau dari segi jumlah personil secara keseluruhan dibandingkan dengan tingkat luas pelayanan di Kabupaten Purwakarta, tentunya masih sangat kurang memadai. Dari jumlah sumber daya yang ada, kita optimalkan sepenuhnya demi tercapainya target yang telah ditetapkan. Selain itu kemampuan operasional dan teknis akan terus dikembangkan melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah khususnya di daerah.

Sedangkan ditinjau dari segi anggaran pada tahun 2019 ini Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta mendapatkan anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. 89.886.325.217,-. Dari anggaran yang ada, dioptimalkan untuk pencapaian target sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian sasaran strategis didukung oleh pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel, disajikan sebagai berikut :

Sasaran 1 :

Meningkatkan Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik

Tabel 3.6.1
Akuntabilitas Keuangan Sasaran 1

Sasaran	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Anggaran	% Capaian
Meningkatkan Kualitas Ruang dan Fasilitas	Jumlah RTH, Fasilitas Publik, dan Ornamen Kota Yang Dibangun/Direvitalisasi (titik)	38.377.315.400	36.556.907.760	95,26 %	214,29%



Sasaran	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Anggaran	% Capaian
Publik	Presentase RTH yang terpelihara (%)	10.600.000.000	10.122.340.202	95,49 %	80 %
	Persentase Ornamen Kota yang terpelihara (%)	500.000.000	489.737.400	97,95 %	100 %
	Rasio Lampu Hias yang terpasang (%)	2.725.000.000	2.686.795.575	98,60 %	100 %
Jumlah		52.202.315.400	49.855.780.937	95,50 %	93,33 %

Pencapaian sasaran 1 pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman didukung dengan anggaran sebesar Rp. 52.202.315.400,-, realisasi anggaran tersebut adalah Rp. 49.855.780.937,- (95,50 % dari alokasi anggaran). Dukungan anggaran tersebut dialokasikan untuk Program Pembangunan dan Penataan Ruang Publik, Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Program Pemeliharaan Ornamen Kota, Program Pembangunan dan Pengelolaan Lampu Hias dan Program Pengembangan dan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Untuk capaian kinerja pada sasaran 1 mencapai 93,33 % sedangkan untuk realisasi anggarannya mencapai 95,50 %



Sasaran 2 :

Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana Lingkungan

Tabel 3.6.2
Akuntabilitas Keuangan Sasaran 2

Sasaran	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Anggaran	% Capaian
Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana Lingkungan	Panjang Jalan Lingkungan yang dibangun /diperbaiki (Km)	9.518.584.200	9.425.147.600	99,02 %	315,78 %
	Persentase Daerah Genangan Yang Tertangani (%)	4.305.000.000	3.574.692.440	83,04 %	246,19%
	Rasio Ketersediaan TPU milik pemda (%)	500.000.000	495.071.600	99,01 %	23,58 %
	Jumlah Unit Pengelola Limbah Komunal yang dibangun	650.000.000	616.241.317	94,81 %	100 %
	Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina (Jumlah Kelompok Masyarakat)	200.000.000	185.445.000	92,72 %	282,35 %
Jumlah		15.173.584.200	14.296.597.957	94,22 %	193,58 %

Pencapaian sasaran 2 Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman didukung dengan anggaran sebesar Rp. 15.173.584.200,-, realisasi anggaran tersebut adalah Rp. 14.296.597.957,- (94,22% dari alokasi anggaran). Dukungan anggaran tersebut dialokasikan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan, Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, Program Lingkungan Sehat Perumahan, Program



Pemberdayaan Komunitas Perumahan, dan Program Pengelolaan Areal Pemakaman. Untuk capaian kinerja pada sasaran 2 mencapai 193,58% sedangkan untuk realisasi anggarannya mencapai 94,22 %,

Sasaran 3 :

Tersedianya Hunian Yang Layak Bagi Seluruh Masyarakat

Tabel 3.6.3
Akuntabilitas Keuangan Sasaran 3

Sasaran	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Anggaran	% Capaian
Tersedianya Hunian Yang Layak Bagi Seluruh Masyarakat	Rasio Rumah Layak Huni (%)	950.000.000	872.442.450	91,84 %	100,66 %

Pencapaian sasaran 3 pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman didukung dengan anggaran sebesar Rp. 950.000.000,-, realisasi anggaran tersebut adalah Rp. 872.442.450,- (91,84% dari alokasi anggaran). Dukungan anggaran tersebut dialokasikan Program Pengembangan Perumahan. Untuk capaian kinerja pada sasaran 3 mencapai 100,66 % sedangkan untuk realisasi anggarannya mencapai 91,84 %



**Sasaran 4:
Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih Masyarakat**

**Tabel 3.6.4
Akuntabilitas Keuangan Sasaran 4**

Sasaran	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Anggaran	% Capaian
Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih Masyarakat	Persentase Desa Rawan Air Bersih (%)	925.000.000	904.854.200	97,82%	123,40 %
	Persentase Mata Air yang Diamankan (%)	207.315.400	92.024.900	44,39 %	144,33 %
Jumlah		1.132.315.400	996.879.100	88,04 %	133,87 %

Pencapaian sasaran 4 pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.132.315.400,- yang dialokasikan untuk Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum. Realisasi anggaran dari pencapaian sasaran ini adalah Rp. 996.879.100,- (88,09% dari alokasi anggaran). Untuk capaian kinerja pada sasaran 4 mencapai 88,04 % sedangkan untuk realisasi anggarannya mencapai 133,87%



Sasaran 5:

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah.

Tabel 3.6.5
Akuntabilitas Keuangan Sasaran 5

Sasaran	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Anggaran	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah	Persentase RDTR / RTR Kawasan Strategis Yang Ditetapkan (%)	900.000.000	857.030.000	95,23 %	0
	Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang (%)	325.000.000	234.060.000	72,02 %	100 %
	Lama Proses Pengesahan Rencana Tapak/Penerbitan Rekomendasi IMB (Hari	1.722.600.000	1.239.067.058	71,93 %	43 %
	Persentase Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang yang dipantau (%)	50.000.000	44.217.500	88,44 %	100 %
Jumlah		2.997.600.000	2.374.374.558	79,21 %	60,75 %

Pencapaian sasaran 5 pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman didukung dengan anggaran sebesar Rp. 2.997.600.000,-, realisasi anggaran tersebut adalah Rp. 2.374.374.558,- (79,21% dari alokasi anggaran).



Dukungan anggaran tersebut dialokasikan untuk Program Pemanfaatan Ruang, Program Perencanaan Tata Ruang, Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dan Program Keselamatan Gedung dan Bangunan. Untuk capaian kinerja pada sasaran 5 mencapai 60.75 % sedangkan untuk realisasi anggarannya mencapai 60,75%.

Sasaran 6 :
Optimalisasi Tata Kelola Pertanahan.

Tabel 3.6.6
Akuntabilitas Keuangan Sasaran 6

Sasaran	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Anggaran	% Capaian
Optimalisasi Tata Kelola Pertanahan.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tanah Untuk Pembangunan (%)	8.689.954.500	8.346.861.215	96,05 %	100 %

Pencapaian sasaran 6 pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman didukung dengan anggaran sebesar Rp. 8.689.954.500,-, realisasi anggaran tersebut adalah Rp. 8.346.861.215,- (96,05% dari alokasi anggaran). Dukungan anggaran tersebut dialokasikan untuk Program Fasilitasi Administrasi Umum Pertanahan. Untuk capaian kinerja pada sasaran 6 mencapai 100 % sedangkan untuk realisasi anggarannya mencapai 96,05%.

3.7 Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Tata Ruang dan Permukiman Tahun 2019 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.



Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019 Dinas Tata Ruang dan Permukiman mendapat alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Purwakarta (setelah perubahan) sebesar Rp. 101.879.733.305,- dengan perincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 11.993.408.088,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 89.886.325.217,- dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp. 95.459.469.233,- atau 93.70 % dari anggaran yang ditetapkan terdiri atas realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 10.610.066.564 atau 85,89% dan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 84.849.402.669 atau 94,40 %.

3.8 Alokasi Anggaran terhadap Sasaran Strategis

Berdasarkan penetapan kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman tahun 2019 terdapat 6 (enam) sasaran strategis kemudian guna merealisasikan sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui 22 (dua puluh dua) program dan 168 kegiatan pada saat perubahan anggaran. Berdasarkan sasaran strategis tersebut alokasi anggaran untuk memfasilitasi pencapaian kinerjanya tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 89.886.325.217,- dengan pengalokasian anggaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8.1

ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS TAHUN ANGGARAN 2019

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Tingkat Capaian %
Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik					
1	Program Pembangunan dan Penataan Ruang Publik	Lanjutan Penataan Kawasan Kantor Kecamatan Maniis	1.000.000.000	970.062.000	97,01%
		Pemagaran Dan EmplACEMENT Kantor Kecamatan Kiarapedes	200.000.000	188.336.000	94,17%
		Pemagaran Dan EmplACEMENT Kantor Kecamatan Bungursari	200.000.000	188.765.500	94,38%
		Penataan Kantor Kelurahan Purwamekar	2.000.000.000	1.856.223.000	92,81%



No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Tingkat Capaian %
		Penataan Kantor Kelurahan Tegalmunjul	2.000.000.000	1.960.981.000	98,05%
		Rehab Kantor UDDC PMI Kabupaten Purwakarta	1.000.000.000	968.731.000	96,87%
		Perencanaan Teknis Penataan Bangunan Dan Lingkungan	75.000.000	58.500.000	78,00%
		Rehabilitasi Masjid Ba'ing Yusuf	500.000.000	460.196.600	92,04%
		Karya Bakti TNI Resimen Armed 2 Sthira Yudha Penataan Tajug Gede Cilodong	12.000.000.000	11.653.258.300	97,11%
		Pembangunan Gedung Pusat Pelayanan Terpadu Pasar Jumaah	5.000.000.000	4.851.138.000	97,02%
		Pembangunan Kantor Kesbang	2.500.000.000	2.257.969.000	90,32%
		Pembangunan Kantor DPMD	3.000.000.000	2.507.186.610	83,57%
		Pemeliharaan Gapura Batas Kabupaten Purwakarta	300.000.000	294.625.000	98,21%
		Penyempurnaan Gapura Kota	200.000.000	186.936.800	93,47%
		Penataan Emplacement Gedung Kantor Dinas Tata Ruang dan Permukiman	100.000.000	98.691.000	98,69%
		Penyempurnaan Kawasan Kantor Kecamatan Babakan Cikao	100.000.000	98.153.000	98,15%
		Penataan Kawasan Kuliner Kecamatan Plered	100.000.000	94.275.000	94,28%
		Penataan PKL Cikopo	475.000.000	458.719.000	96,57%
		DED Pembangunan Baru Kantor Kecamatan Tegalwaru	100.000.000	95.513.000	95,51%
		DED Pembangunan Baru Kantor Kecamatan Pondoksalam	100.000.000	96.900.800	96,90%
		DED Pembangunan Baru Gedung Kantor Kelurahan Ciseureuh	100.000.000	94.882.650	94,88%
		Penyempurnaan Gedung Kantor UTD PMI Kabupaten Purwakarta	500.000.000	475.441.000	95,09%
		DED Pembangunan Kantor Diskominfo	100.000.000	97.216.000	97,22%
		DED Pembangunan Baru Kantor Pelayanan Untuk 3 Dinas (DPMD, DINSOS, BKBPIA)	100.000.000	98.800.000	98,80%
		DED Pembangunan Kantor Dinas Perhubungan	100.000.000	98.960.000	98,96%
		DED Pembangunan Kantor Depo Arsip	100.000.000	98.659.000	98,66%



No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Tingkat Capaian %
		Lanjutan Pembangunan Gedung Pusat Pelayanan Terpadu Pasar Jumaah	877.315.400	852.776.400	97,20%
		Perencanaan Museum Nyi Pohaci	350.000.000	341.951.400	97,70%
		Pembangunan Mako Polres Purwakarta Tahap I	5.000.000.000	4.861.190.700	97,22%
		DED Pembangunan Kantor Disnakertrans	100.000.000	97.325.000	97,33%
		DED Buper Kwarcab Purwakarta	100.000.000	94.545.000	94,55%
2	Program Pemeliharaan Ornamen Kota	Pemeliharaan Panggung Reklame	50.000.000	48.530.000	97,06%
		Pemeliharaan dan Sewa Billboard Purwakarta Istimewa Tol Cipularang Km 86	200.000.000	196.136.400	98,07%
		Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Teknis Penertiban dan Pembongkaran Reklame	50.000.000	48.963.000	97,93%
		Pembangunan Gudang Reklame	200.000.000	196.108.000	98,05%
3	Program Pembangunan dan Pengelolaan Lampu Hias	Pemeliharaan Lampu Hias Taman dan Lampu Hias Gedung	200.000.000	197.263.000	98,63%
		Pemeliharaan Lampu Hias Lampion	200.000.000	196.729.000	98,36%
		Pemeliharaan Lampu Hias Tirai	200.000.000	196.256.000	98,13%
		Pemeliharaan Lampu Gapura Batas Kota	150.000.000	146.748.000	97,83%
		Pemeliharaan Lampu Cabang Tiga	75.000.000	72.618.975	96,83%
		Pembuatan Lampu Hias Tirai Jalur Kuliner	100.000.000	97.199.000	97,20%
4	Program Pembangunan dan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)	Pemeliharaan Jaringan Transmisi PJU	800.000.000	791.811.600	98,98%
		Pemasangan Jaringan Transmisi PJU	1.000.000.000	988.170.000	98,82%
5	Program Pengelolaan Ruang Terbuka	Pemeliharaan RTH	300.000.000	296.045.000	98,68%



No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Tingkat Capaian %
	Hijau (RTH)				
		Pemeliharaan Persemaian Bibit Tanaman Hias	325.000.000	320.856.600	98,73%
		Pengadaan Mesin Rumput dan Chainsaw	100.000.000	95.585.000	95,59%
		Pemeliharaan Pompa Air	50.000.000	48.736.000	97,47%
		Pengecatan Gapura Batas Kabupaten	50.000.000	48.700.000	97,40%
		Pengecatan Gapura Kota	25.000.000	23.822.000	95,29%
		Pemeliharaan Taman Sadang	50.000.000	48.400.000	96,80%
		Pemeliharaan Taman Batas Kota	150.000.000	146.515.000	97,68%
		Pengadaan Tanaman Penghijauan	450.000.000	446.577.200	99,24%
		Pemeliharaan Taman Surawisesa	400.000.000	378.951.000	94,74%
		Pemeliharaan Taman Situ Buleud	1.000.000.000	961.808.343	96,18%
		Pemeliharaan Taman Cilodong	275.000.000	270.205.000	98,26%
		Pemeliharaan Patung	100.000.000	96.881.000	96,88%
		Pemeliharaan Repika Guci Keramik	100.000.000	97.370.196	97,37%
		Lanjutan Penataan Taman Tangga Cinta	400.000.000	395.330.000	98,83%
		Lanjutan Penataan Taman Baca	75.000.000	73.416.000	97,89%
		Pembuatan Garasi Kendaraan	200.000.000	198.706.600	99,35%
		Sewa Lahan Jalan Tengah	200.000.000	68.350.000	34,18%
		Rehabilitasi Taman Kemuning	200.000.000	197.400.000	98,70%
		Penataan Taman Jalan Jendral A. Yani	50.000.000	48.061.000	96,12%
		Biaya Operasional Penebangan Pohon	50.000.000	41.990.000	83,98%
		Pemeliharaan Taman Citra Resmi	100.000.000	97.210.600	97,21%
		Perencanaan Revitalisasi dan Penambahan Air Mancur Taman Sri Baduga	100.000.000	90.545.000	90,55%
		Peningkatan Kinerja Pengawasan dan Keselamatan Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum	300.000.000	285.268.000	95,09%
		Pemeliharaan Taman Tebing Ciganea	200.000.000	197.611.463	98,81%
		Pemagaran Taman	100.000.000	97.199.500	97,20%
		Perencanaan Penyiraman Otomatis Taman	100.000.000	91.530.000	91,53%
		Pemasangan Instrumen Tugu Pasar Rebo	100.000.000	93.575.000	93,58%
		Pembangunan Tugu Jam di Perempatan Pasar Rebo	-	-	#DIV/0!



No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Tingkat Capaian %
		Pengadaan Elektrikal Situ Buleud	200.000.000	196.635.000	98,32%
		Penataan Tugu Jam di Perempatan Pasar Rebo	200.000.000	195.959.000	97,98%
		Persediaan Bahan Cadangan Perbaikan Taman dan Penerangan Jalan Umum	50.000.000	48.072.700	96,15%
		Penataan Air Mancur Welas Asih	4.500.000.000	4.326.218.000	96,14%
		Capacity Building Pegawai Taman	100.000.000	98.810.000	98,81%
Sasaran 2 : Meningkatkan Pelayanannya Sarana Prasarana Lingkungan					
1	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Menuju Sekolah	3.217.684.600	3.156.212.150	98,09%
		Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perkotaan	5.598.000.000	5.597.693.600	99,99%
		Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Lomba Desa	200.000.000	197.153.000	98,58%
		Pendataan Lokasi dan Kondisi Jalan Lingkungan Perkotaan di Kabupaten Purwakarta	107.899.600	104.905.600	97,23%
		Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan Kabupaten	125.000.000	122.012.000	97,61%
		Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Kabupaten	120.000.000	99.861.000	83,22%
		Rabat Beton Jalan Rawa Taal Desa Tegal Datar (Banprov Tahun 2019)	150.000.000	147.310.250	98,21%
2	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Pembangunan Drainase Perkotaan Kabupaten Purwakarta	3.500.000.000	2.782.910.490	79,51%
		Pembangunan TPT Kabupaten Purwakarta	400.000.000	396.931.000	99,23%
		Perencanaan dan Pengawasan Drainase	180.000.000	173.752.000	96,53%
		Pembangunan Drainase Desa/Kel. Pasanggrahan Kecamatan Tegal waru Kabupaten Purwakarta (Banprov Tahun 2019)	150.000.000	147.367.250	98,24%



No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Tingkat Capaian %
		Pembangunan Drainase Jalan Ciakar - Warung Jeruk Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta (Banprov Tahun 2019)	75.000.000	73.731.700	98,31%
3	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Pembangunan MCK Kabupaten Purwakarta	600.000.000	569.598.317	94,93%
		Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan MCK	50.000.000	46.643.000	93,29%
4	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Monitoring Program Kotaku	200.000.000	185.445.000	92,72%
5	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Rehabilitasi Tempat Pemakaman Umum	250.000.000	247.453.600	98,98%
		Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan Sirnaraga (TMP)	250.000.000	247.618.000	99,05%
Sasaran 3 : Tersedianya Hunian Yang Layak Bagi Seluruh Masyarakat					
1	Program Pengembangan Perumahan	Identifikasi Penyerahan PSU Perumahan Pengembang di Kabupaten Purwakarta	125.000.000	114.703.400	91,76%
		Perencanaan Teknis Sarana & Prasarana Perumahan dan Permukiman	50.000.000	49.789.875	99,58%
		Monitoring Penyelenggaraan Perumahan	100.000.000	63.057.675	63,06%
		Dana Pendamping Rutilahu	150.000.000	140.888.825	93,93%
		Penyusunan Database Perumahan & Permukiman di Kabupaten Purwakarta	125.000.000	118.759.225	95,01%
		Penyusunan RP3KP Kabupaten Purwakarta	400.000.000	385.243.450	96,31%
Sasaran 4 : Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih Masyarakat					
1	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Identifikasi Kawasan Rawan Air Bersih Kabupaten Purwakarta	300.000.000	296.581.900	98,86%
		Penyediaan Sarana Air Bersih Kabupaten Purwakarta	400.000.000	391.837.300	97,96%



No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Tingkat Capaian %
		Monitoring Kegiatan PAMSIMAS	225.000.000	216.435.000	96,19%
2	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Pembangunan Jembatan Pipa Air Minum Sasak Beusi	107.315.400	774.900	0,72%
		Penyusunan Naskah Akademis Tentang Raperda RISPAM	100.000.000	91.250.000	91,25%
Sasaran 5 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah					
1	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Peningkatan Kinerja Pengesahan Site Plan	50.000.000	44.217.500	88,44%
2	Program Pemanfaatan Ruang	Pendataan Pemanfaatan Ruang	75.000.000	32.010.000	42,68%
		Finalisasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang Review Kajian Kawasan Perkotaan Purwakarta	50.000.000	45.850.000	91,70%
		Finalisasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang Review Kajian Kawasan Perkotaan Plered	50.000.000	29.300.000	58,60%
		Finalisasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang Review Kajian Kawasan Perkotaan Bungursari	50.000.000	48.300.000	96,60%
		Finalisasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang Review Kajian Kawasan Perkotaan Wanayasa	50.000.000	30.300.000	60,60%
		Finalisasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang Review Kajian Kawasan Perkotaan Campaka	50.000.000	48.300.000	96,60%
3	Program Keselamatan Gedung dan Bangunan	Monitoring dan Pemeriksaan IMB	100.000.000	64.390.000	64,39%
		Sosialisasi Izin Mendirikan Bangunan	200.000.000	191.211.558	95,61%



No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Tingkat Capaian %
		Pendataan Bangunan	150.000.000	114.670.000	76,45%
		Monitoring dan Pemeriksaan SLF	100.000.000	4.560.000	4,56%
		Penyempurnaan Aplikasi Sistem SOP Pelayanan IMB	25.000.000	23.500.000	94,00%
		Pengadaan Alat Penunjang Pengawasan Kegiatan Fisik Keciptakarya	50.000.000	48.150.000	96,30%
		Inventarisasi dan Pendataan Bangunan Industri di Kabupaten Purwakarta	200.000.000	188.292.500	94,15%
		Inventarisasi dan Pendataan Perumahan di Kabupaten Purwakarta	300.000.000	294.299.500	98,10%
		Biaya Penunjang Tim Ahli Bangunan Gedung	100.000.000	2.050.000	2,05%
		Biaya Penunjang Tim Ahli Pengkaji Teknis	100.000.000	3.150.000	3,15%
		Kajian Teknis dan Naskah Akademis Peraturan Daerah Penentuan Nilai Retribusi IMB	100.000.000	97.853.000	97,85%
		Kajian Teknis dan Naskah Akademis Pengaturan Intensitas Bangunan di Kabupaten Purwakarta	100.000.000	96.062.500	96,06%
		Sertifikat laik Fungsi Bangunan Kantor Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta	150.000.000	102.378.000	68,25%
		Monitoring Tim Teknis Pemeriksa Bangunan	47.600.000	8.500.000	17,86%
4	Program Perencanaan Tata Ruang	Review Kajian Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Babakancikao	400.000.000	381.722.500	95,43%
		Review Kajian Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Pasawahan	400.000.000	379.382.500	94,85%
		Kajian Teknis dan Naskah Akademis Arah dan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Perumahan	100.000.000	95.925.000	95,93%
Sasaran 6 : Optimalisasi Tata Kelola Pertanahan					
1	Program Fasilitasi Administrasi Umum Pertanahan	Pengadaan Tanah Kantor Camat Tegalaru	1.500.000.000	1.451.826.000	96,79%



No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Tingkat Capaian %
		Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	2.689.954.500	2.663.829.515	99,03%
		Pengadaan Tanah di Desa Cianting	200.000.000	179.554.000	89,78%
		Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Purwakarta	4.300.000.000	4.051.651.700	94,22%



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 selain merupakan media pertanggungjawaban Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sebagai bahan pertanggungjawaban, LAKIP Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta ini adalah merupakan sarana evaluasi bagi Unit Kerja di Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta, sehingga diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagai amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 ini menyajikan evaluasi kinerja, analisis kinerja dan pembuatan kesimpulan hasil evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam penyelenggaraan program-program pembangunan yang selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Pada Tahun 2019 Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta telah membuat pernyataan penetapan kinerja. Dalam dokumen



penetapan kinerja tersebut ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis kemudian guna merealisasikan sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui 22 (dua puluh dua) program dan 168 kegiatan pada saat perubahan anggaran.

Berdasarkan dokumen penetapan kinerja tersebut, pencapaian kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta pada Tahun pencapaian **sasaran strategis pertama** yaitu **“Meningkatkan Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik”** dengan capaian **93,33 % (Tidak Tercapai)**, selanjutnya **sasaran strategis ke dua** yaitu **“Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana Lingkungan”** dengan rata-rata capaian sebesar **193,58 % (Target Terlampaui)**, pada pencapaian **sasaran strategis ke tiga** **“Tersedianya hunian yang layak bagi seluruh masyarakat”** dengan pencapaian sebesar **100,66% (Target Terlampaui)**, selanjutnya sasaran strategis ke empat yaitu **“Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih Masyarakat”** dengan capaian rata-rata sebesar **133,87% (Target Terlampaui)**, untuk **sasaran strategis ke lima** yaitu **“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah”** mendapat capaian rata rata **60,75% (Target Tidak Tercapai)** dan **untuk sasaran strategis ke enam** yaitu **“Optimalisasi Tata Kelola Pertanahan”** mendapatkan capaian sebesar **100% (Target Tercapai)**

Pencapaian kinerja dari seluruh sasaran tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) sasaran capaiannya melampaui target, 1 (satu) sasaran yang capaiannya mencapai target dan 2 (dua) sasaran tidak mencapai target. Dari perhitungan rata-rata atau kumulatif, capaian kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta pada tahun 2019 mencapai persentase 113,69 %, dengan hasil tersebut diatas kinerja Kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta pada tahun 2019 dapat dinilai “sangat berhasil”.

Pencapaian kinerja tersebut tidak hanya melihat pencapaian angka semata, namun hasil kerja nyata semua elemen dan unsur pada Dinas Tata



Ruang dan Permukiman melalui program dan kegiatan yang tersebar di Sekretariat dan 4 (empat) Bidang.

Selama tahun 2019 terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta meliputi :

Kendala dan Hambatan :

1. Pengelolaan data yang belum terintegrasi antar unit kerja sehingga berpengaruh terhadap efektivitas komunikasi pengelolaan data dan penentuan indikator kinerja.
2. Pemahaman terhadap materi LAKIP bagi pelaksana kegiatan masih kurang sehingga dalam penentuan Rencana Kinerja terutama penetapan indikator kinerja. Pada umumnya pelaksana kegiatan masih terfokus dengan pelaksanaan kegiatannya masing-masing dan masih belum memahami keberadaan LAKIP sebagai laporan pertanggungjawaban keseluruhan unit kerja bukan hanya merupakan pertanggungjawaban unit kerja yang mempunyai tugas sebagai penyusun LAKIP.
3. Masih terjadi kesenjangan antara kebutuhan kompetensi guna pelaksanaan tugas dengan kompetensi yang dimiliki aparatur. Hal ini mengakibatkan kurangnya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Belum sinkronnya antara dokumen perencanaan dengan implementasi dalam dokumen pelaksanaan, hal ini menyebabkan target yang sebelumnya telah ditetapkan pada dokumen perencanaan kurang sesuai dengan program dan kegiatan dalam dokumen pelaksanaan.
5. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan sering tidak berhasil secara optimal dan kurang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.



Mengingat kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta perlu diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

Langkah Antisipatif :

1. Diperlukan pengelolaan data yang lebih efektif dengan membuat sistem informasi pengelolaan data pada setiap unit kerja yang dapat terintegrasi pada suatu sistem informasi pengelolaan data secara keseluruhan dari setiap unit kerja tersebut.
2. Meningkatkan koordinasi ekstern dengan Instansi terkait baik pada tingkat provinsi, kabupaten maupun instansi terkait termasuk dengan penyedia barang/jasa (pihak ke-III) dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan pekerjaan umum bidang keciptakaryaan, perumahan dan penataan ruang juga dengan meningkatkan koordinasi intern dengan antar unit kerja dan para pengelola serta penanggung jawab kegiatan pada tiap unit kerja di lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
3. Meningkatkan kompetensi dan responsibilitas aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan upaya-upaya lain, sehingga diharapkan segala permasalahan yang timbul, dapat segera direspon secara cepat dan akurat tanpa menimbulkan permasalahan baru.
4. Melakukan identifikasi terhadap sasaran dan indikator kinerja sehingga sasaran dan indikator kinerja dapat mewakili ukuran indikator baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.
5. Meningkatkan pendekatan kepada masyarakat dengan mensosialisasikan setiap program dan kegiatan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah semakin meningkat.